


ISBN 978-623-6340-93-6

# BONUS DEMOGRAFI MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan



 085725994411

 cv.mine7

 mine mine



Penerbit : cv. Mine  
Perum Sidorejo Bumi Indah F 153  
Rt 11. Ngestiharjo Kasihan Bantul  
Mobile : 085725994411  
email : cv.mine.7@gmail.com

ISBN 978-623-6340-93-6



Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes.  
Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.

Editor :  
Husnul Fatimah, SKM.



# **Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045**

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan

**Penulis:**

Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes.

Dr. Ir. Syahril Shaddiq, M.Eng., M.M.

**Editor:**

Husnul Fatimah, SKM.



# **Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045**

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan

**Penulis:**

Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes.

Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.

**Editor:**

Husnul Fatimah, SKM.

Hak Cipta © 2023, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit CV Mine

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

Cetakan ke-1 Tahun 2023

CV Mine

Perum SBI F 153 Rt 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta - 55182

Telp: 085725994411

Email: [cv.mine.7@gmail.com](mailto:cv.mine.7@gmail.com)

**ISBN : 978-623-6340-93-6**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan”**. Buku ini disusun sebagai acuan dasar bagi Masyarakat luas terkait bonus demografi.

Dengan segala keterbatasannya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat aktif memberikan fasilitas dan dukungan sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan penyempurnaan.

Ucapan terima kasih untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan selama proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya sebagai bahan bacaan yang bermanfaat.

Banjarbaru, Oktober 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. Bonus Demografi.....	1
BAB II. Program Kesehatan Reproduksi dan Bonus Demografi.....	10
BAB III. Kesehatan Ibu dan Anak dan Indonesia Emas 2045 .....	18
BAB IV. Indikator Ekonomi pada Bonus Demografi.....	34
BAB V. <i>Green Economy</i> Menyongsong Indonesia Emas 2045.....	108
BAB VI. Ekonomi Digital dan Bonus Demografi.....	135

# **BAB I**

## **BONUS DEMOGRAFI**

### **A. Pengertian Bonus Demografi**

Bonus demografi merupakan fenomena ledakan penduduk usia kerja yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2030 (Ginting, 2016). Bonus demografi juga dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketergantungan sebagai akibat dari proses penurunan angka kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo & Samosir, 2010). Istilah bonus demografi didefinisikan sebagai indikator angka ketergantungan atau rasio beban ketergantungan. Rasio ini menunjukkan berapa persen penduduk yang tergolong konsumtif perlu didukung oleh mereka yang berusia 15-64 tahun yang dianggap sebagai penduduk yang berpotensi produktif.

Seiring berkembangnya zaman, tidak dapat dihindari tingkat partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja. Hal tersebut menyebabkan

bertambahnya angkatan usia produktif atau Angkatan kerja yang akan berdampak pada penurunan rasio ketergantungan. Tingkat kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai oleh setiap individu yang mempopulerkan banyak nya perempuan yang ingin bekerja. Program Keluarga Berencana (KB) yang berlaku di Indonesia juga menjadi penyebab menurunnya rasio ketergantungan. Dampak dari program KB adalah menurunnya tingkat kelahiran bayi atau menurunnya fertilitas. Tingkat fertilitas juga di tentukan oleh karakteristik setiap individu, yaitu keputusan suami istri dalam hal jumlah anak. Jadi standar hidup merupakan determinan fertilitas. Tinggi rendahnya fertilitas disebabkan oleh pandangan setiap individu dan peningkatan pendidikan yang mampu mengubah cara berfikir seseorang menjadi lebih rasional untuk mempertimbangkan keinginan menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan produktivitasnya. Kemudian penurunan angka kematian bayi yang di sebabkan oleh menurunnya fertilitas dan

terpenuhinya tingkat kesehatan yang di dapatkan (Panggabean, 2020).

Masa bonus demografi merupakan aset penting untuk membangun dan meningkatkan kemajuan suatu negara. Hal ini diungkapkan oleh Adioetomo (2010), bonus demografi adalah manfaat ekonomi yang diwujudkan dengan pengurangan proporsi tanggungan. Keunggulan ekonomi yang disebutkan yaitu ada banyak keuntungan ketika proporsi tanggungan lebih sedikit, sehingga diharapkan terjadi kenaikan tabungan dari pendapatan golongan penduduk usia kerja.

## **B. Indikator Bonus Demografi**

Indikator bonus demografi adalah sensus penduduk. Sensus atau cacah jiwa adalah proses yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu badan pusat statistik untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota dalam populasi. Bentuk indikator yang digunakan diantaranya (Saumana et al., 2020):



1. Jumlah penduduk usia kerja lebih besar dari pada usia tidak kerja.
2. Usia kerja menopang usia tidak kerja.
3. Mulainya bonus demografi dilihat dari transisi demografi hasil sensus sebelumnya

### **C. Fenomena Bonus Demografi**

Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo, 2007). Istilah bonus demografi yang diartikan sebagai sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu indikator angka ketergantungan/rasio beban ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif (Lembaga Demografi FE UI, 1981).

Penurunan angka ketergantungan sebagai hasil transisi demografi pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat kembali, pada saat menunjukkan angka yang paling terendah yang biasanya berada di bawah 50 persen, disebut dengan jendela peluang (the window of opportunity). Jendela peluang tersebut sangat singkat dan hanya terjadi satu kali saja dalam satu decade seluruh perjalanan kehidupan penduduk. Adioetomo (2007) berpendapat bahwa the window of opportunity baru dapat terjadi apabila ada kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna membantu pertumbuhan ekonomi.

Rasio ketergantungan mengindikasikan dampak potensial dari perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Karena rasio ketergantungan menghubungkan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok yang bergantung secara ekonomi dengan kelompok yang kemungkinan besar

menjadi kelompok yang aktif secara ekonomi, maka rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial. Melalui rasio ketergantungan, dapat diketahui juga kelompok mana yang lebih bergantung kepada para pekerja, apakah kelompok anak-anak yang lebih dominan, atau kelompok penduduk usia lanjut yang lebih dominan. Dengan demikian, penetapan kebijakan dukungan sosial terhadap masing-masing kelompok dapat lebih terfokus dan tepat sasaran (Nasution, 2021).

Rasio ketergantungan yang tinggi mengindikasikan bahwa penduduk yang aktif secara ekonomi menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh anak-anak dan penduduk usia lanjut yang secara ekonomi bergantung terhadap mereka. Tingginya rasio ketergantungan penduduk muda berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak. Rasio ketergantungan sensitif terhadap perubahan tingkat fertilitas. Ketika fertilitas

turun, rasio ketergantungan akan turun karena proporsi anak-anak menurun sementara proporsi penduduk usia kerja meningkat. Periode ketika rasio ketergantungan mengalami penurunan dikenal dengan nama jendela peluang (*window of opportunity*) dan bonus demografi (*demographic dividend*) kemungkinan diraih karena masyarakat memiliki jumlah produsen potensial yang meningkat secara relatif terhadap jumlah konsumen. Namun, apabila tingkat fertilitas terus menurun, rasio ketergantungan akan meningkat kembali karena proporsi penduduk usia kerja akan mulai turun dan proporsi penduduk usia lanjut mulai meningkat. Ketika penduduk usia lanjut meningkat dan meningkatkan rasio ketergantungan penduduk tua, maka dibutuhkan penambahan investasi pada jaminan sosial dan sistem kesehatan Masyarakat (Nasution, 2021).

Bonus demografi tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar, melainkan harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut.

UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika tiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik. Terciptanya bonus demografi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada tahun 1970-an, yaitu Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan kebijakan KB berhasil menurunkan angka kelahiran, bersamaan dengan penurunan angka kematian melalui kebijakan peningkatan kualitas kesehatan. Sejak kebijakan tersebut, Indonesia mengalami transisi demografi atau perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi anak-anak usia 15 tahun ke bawah menurun dengan cepat, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan peningkatan perlahan penduduk lansia. Dengan demikian, sejak sekitar tahun 1980-an, Indonesia masuk dalam era bonus demografi yang puncaknya akan terjadi sekitar tahun 2030,

yang disebut sebagai jendela peluang (window of opportunity). Pada tahun 2030 tersebut, proporsi penduduk usia 15-64 tahun di Indonesia mencapai angka 68,1 persen dan angka rasio ketergantungan sebesar 46,9 (Adioetomo, 2018).

## **BAB II**

### **PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI DAN BONUS DEMOGRAFI**

Menghadapi Bonus Demografi, BKKBN mengambil peran meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga. Mendorong agar setiap anak yang dilahirkan berkualitas, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan, dengan memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif, diharapkan orangtua cerdas dalam mengurus buah hati mulai dari kebutuhan gizi hingga stimulus perkembangannya (BKKBN, 2017).

#### **A. Keluarga Berencana (KB)**

Salah satu program yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan reproduksi dan bonus demografi adalah program Keluarga Berencana, BKKBN mengembangkan dan intensifkan program kampung KB. Kampung KB sinergis dengan program lain sehingga dapat mewujudkan keluarga berkualitas

dan tentu terus berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, dan tentunya juga untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi penduduk miskin dan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dan meningkatkan ketahanan keluarga (BKKBN, 2017).

Program keluarga berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesejahteraan Reproduksi yang berkualitas serta mengedalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas akan memperbaiki segala aspek kehidupan di masyarakat. Sejalannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (Tiffani, 2020):

1. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah Upaya



terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

2. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

5. Pembangunan keluarga adalah Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Keluarga berencana adalah Upaya untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Adioetomo, 2010). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang masa esa (Tiffani, 2020).

Pembangunan keluarga adalah Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak yang ideal dengan menggunakan cara alat dan obat kontrasepsi. Program keluarga

berencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya pengendalian pertumbuhan/ pengaturan kelahiran saja, serta diarahkan untuk membantu keluarga, baik sebagai individu, keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara, sehingga jika keluarga mampu merencanakan kehidupan keluarga dengan baik, maka akan dicapai keluarga berkualitas, dan akan dapat generasi yang baik pula. Ini berarti program keluarga berencana adalah Investasi Sumber Daya Manusia dalam rangka perwujudan bonus demografi (Tiffani, 2020).

## **B. Generasi Berencana**

Selain itu, ada pula program bernama “Generasi Berencana” untuk merespon permasalahan remaja bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini adalah upaya dalam Pembangunan SDM sebagai bagian dari program pembangunan telah dilakukan pemerintah pada banyak aspek kehidupan masyarakat termasuk

pembangunan SDM yang dilakukan oleh BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pada tataran remaja agar kedepannya memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan berkualitas dan berdaya saing tinggi (Dwiyana, 2015).

Menurut BKKBN (2012) Program GenRe adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR, menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Sedangkan GenRe adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2012).

Program GenRe ini terfokus pada pembinaan karakter remaja Indonesia menjadi remaja visioner.

Program GenRe ini memiliki dua pendekatan yaitu Pusat Informasi Konseling (PIK) jalur pendidikan secara langsung dan Bina Keluarga Remaja (BKR) jalur masyarakat secara tidak langsung. Seperti hasil penelitian dari Binti Maunah terkait dengan pembentukan karakter anak juga dapat dilakukan melalui dua strategi, sama halnya dengan dua pendekatan program GenRe tersebut, yaitu internal sekolah dan eksternal sekolah. Strategi internal sekolah dapat dilakukan melalui empat pilar, yakni kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah (school culture), kegiatan pembiasaan (habituation), kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Strategi eksternal dapat dilakukan melalui keluarga dan masyarakat (Maunah, 2014).

Program GenRe yang dirancang oleh Pemerintah dibawah pengawasan dari BKKBN memiliki sebuah keunikan tersendiri, yaitu pelaksana dari kedua pendekatan program adalah remaja sehingga terciptanya suasana yang sesuai dengan usia remaja tersebut. penelitian dari Fitriani

Mediastuti terkait dengan adanya upaya untuk mengurangi perilaku berisiko pada remaja, yaitu melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang berbasis masyarakat. Pengelolaan PIK R berbasis masyarakat yang efektif membutuhkan support manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dari berbagai stakeholder (Mediastuti & Setyorini, 2014). Begitu juga dengan hasil penelitian dari Lilis Indah sari yang memaparkan adanya implementasi ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) dalam mencegah kenakalan remaja dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu penyuluhan atau sosialisasi, konseling, dan membangun keakraban (Indahsari & Setyowati, 2015).

### **BAB III**

## **KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN INDONESIA EMAS 2045**

### **A. Kesehatan Ibu Dan Anak**

Kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu isu krusial dalam pencapaian pembangunan kesehatan di suatu negara dan merupakan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Upaya kesehatan ibu dan anak mempunyai tujuan untuk menurunkan kematian (mortalitas) dan kesakitan (morbiditas) ibu serta meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pemantauan status gizi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu bersalin, dan anak-anak sampai usia lima tahun (Syafrudin dan Hamidah, 2009).

Keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan ditentukan berdasarkan indikator AKI dan AKB. Hal ini juga menggambarkan kualitas ibu dan anak di Indonesia. Upaya meningkatkan

kelangsungan dan kualitas ibu dan anak dilakukan dengan pendekatan continuum of care the life cycle dan continuum of care of pathway, yang menekankan bahwa upaya promotif dan preventif sama pentingnya dengan upaya kuratif dan rehabilitatif pada tiap siklus kehidupandan pada tiap level pelayanan. Kualitas pelayanan ini didukung oleh SDM kesehatan yang kompeten dan patuh terhadap standar, kesiapan fasilitas pendukung pelayanan lainnya di samping biaya operasional dan supervise fasilitatif yang terus menerus.

Continuum of care-the life cycle artinya pelayanan yang diberikan pada siklus kehidupan yang dimulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa hingga lansia. Continuum of care of pathway artinya penatalaksanaan yang meliputi tempat pelayanan dan level pencegahan, integrasi program, pembiayaan dan stakeholder terkait serta peran dari profesi dan perguruan tinggi. Perlu dipahami pemenuhan perawatan dan pelayanan setiap tahapan kehidupan dan di mana



pelayanan tersebut diberikan. Jika pendekatan intervensi Continuum of Care ini dilaksanakan maka akan memberi dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung obstetri yaitu kematian ibu yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Penyebab tidak langsung yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh penyakit dan bukan karena kehamilan dan persalinannya. Penyakit tuberkulosis, anemia, malaria, sifilis, HIV, AIDS dan lain-lain yang dapat memperberat kehamilan dan meningkatkan risiko terjadinya kesakitan dan kematian. Salah satu kontribusi kematian ibu juga disebabkan oleh 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu sering, terlalu pendek jarak kehamilan, terlalu tua) dan 3 Terlambat (terlambat deteksi dini tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas dan terlambat mendapatkan pertolongan yang adekuat). Sedangkan penyebab utama kematian neonatal

adalah asfiksia, BBLR dan infeksi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Penyebab kematian Ibu dan Neonatal tersebut sebenarnya dapat dicegah jika setiap wanita hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali ke petugas kesehatan. Persiapan kesehatan ibu harus dimulai pada saat seorang wanitamerencanakan kehamilan, selama masa hamil, melahirkan, masa nifas dan menyusui, masa menggunakan kontrasepsi keluarga berencana sampai usia lanjut. Sedangkan kesehatan bayi harus diperhatikan sejak janin berada dalam kandungan, selama proses kelahiran, saat baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah, masa sekolah hingga remaja (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Berikut ini akan diuraikan tentang fokus pelayanan yang diberikan terkait kesehatan ibu dan anak sesuai dengan siklus kehidupannya (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015):

1. Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada wanita sebelum hamil terkait dengan keadaan sistem reproduksi, status penyakit

menular seksual, keadaan status gizi, masalah penyakit fisik dan psikologis. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dengan pelayanan yang diberikan di fasilitas kesehatan untuk memastikan status kesehatan wanita sebelum hamil dalam keadaan baik, karena akan berpengaruh terhadap 1000 hari pertama kehidupan bagi anak yang dimulai sejak masa konsepsi sampai anak balita.

2. Seorang bidan sebagai petugas kesehatan sangatlah penting untuk memperhatikan kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik sejak dalam kandungan sampai masa neonatal melalui pemeriksaan kehamilan yang teratur, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil termasuk pemberian tablet Fe dan Asam Folat. Pemberian imunisasi TT diberikan jika ibu hamil belum memiliki status T 5 dan upaya deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan melalui penggunaan buku kesehatan ibu dan anak serta penanganan kedaruratan

yang terjadi selama masa kehamilan dan persalinan.

3. Pelayanan selama masa nifas dan neonatus berfokus pada upaya inisiasi menyusui dini dan pemberian vitamin K neo. Inisiasi menyusui dini dilakukan sebagai langkah awal pemberian ASI eksklusif dan penggunaan kontrasepsi. Adapun pelayanan neonatus dilakukan melalui pemberian injeksi vitamin K neo pada saat 1 jam pertama kelahiran yang ditujukan untukantisipasi kejadian perdarahan terutama perdarahan pada neonates yang dapat dipicu akibat penyuntikan imunisasi Hepatitis B neo yang diberikan 2 jam setelah bayi lahir.
4. Pelayanan kesehatan bayi, balita dan anak prasekolah difokuskan pada pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian imunisasi booster, serta manajemen terpadu jika bayi dan balita mengalami sakit.

5. Pelayanan anak sekolah dan remaja diberikan dengan tujuan untuk melakukan upaya deteksi dini tumbuh kembang anak sekolah melalui skrining/penjaringan anak sekolah dan remaja, konseling gizi HIV/AIDS NAPZA dan upaya kesehatan sekolah. Selain pelayanan tersebut, pada periode ini harus diberikan juga pelayanan kesehatan reproduksi untuk membekali para remaja supaya memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses reproduksi yang menjadi tanggung jawabnya.

Menindaklanjuti pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan anak sesuai tahapan siklus kehidupannya tersebut, dapat dijelaskan bahwa masalah kesehatan reproduksi yang terkait dengan kesehatan seorang ibu akan berpengaruh besar terhadap kualitas anak yang dikandung serta dilahirkannya. Demikian juga dengan kesehatan seorang anak yang dilahirkan dari rahim dan tubuh ibu yang sehat mempunyai kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Sebaliknya jika kesehatan ibu mengalami gangguan,

akan memberikan pengaruh kurang baik bagi janin yang dikandungnya dan anak yang dilahirkannya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Berikut ini akan diuraikan tentang fokus pelayanan yang diberikan terkait kesehatan ibu dan anak sesuai dengan siklus kehidupannya (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

- Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada wanita sebelum hamil terkait dengan keadaan system reproduksi, status penyakit menular seksual, keadaan status gizi, masalah penyakit fisik dan psikologis. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dengan pelayanan yang diberikan di fasilitas kesehatan untuk memastikan status kesehatan wanita sebelum hamil dalam keadaan baik, karena akan berpengaruh terhadap 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak yang dimulai sejak masa konsepsi sampai anak balita.
- Pelayanan selama masa nifas dan neonatus berfokus pada upaya inisiasi menyusui dini

sebagai langkah awal pemberian ASI eksklusif dan penggunaan kontrasepsi. Sedangkan pelayanan neonatus dilakukan melalui pemberian injeksi vitamin K neo yang ditujukan untukantisipasi kejadian perdarahan akibat penyuntikan imunisasi Hepatitis B neo yang diberikan 2 jam setelah bayi lahir.

- Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak Prasekolah difokuskan pada pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian imunisasi booster, serta manajemen terpadu jika bayi dan balita mengalami sakit.
- Pelayanan Anak Sekolah dan Remaja diberikan dengan tujuan untuk melakukan upaya deteksi dini tumbuh kembang anak sekolah melalui skrining/penjaringan anak sekolah dan remaja, konseling gizi HIV/AIDS NAPZA dan upaya kesehatan sekolah. Selain pelayanan tersebut, pada periode ini harus diberikan juga pelayanan kesehatan reproduksi untuk membekali para

remaja supaya memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses reproduksi yang menjadi tanggung jawabnya (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Menindaklanjuti pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan anak sesuai tahapan siklus kehidupannya tersebut, dapat dijelaskan bahwamasalah kesehatan reproduksi yang terkait dengan kesehatan seorang ibu akan berpengaruh besar terhadap kualitas anak yang dikandung serta dilahirkannya. Demikian juga dengan kesehatan seorang anak yang dilahirkan dari rahim dan tubuh ibu yang sehat mempunyai kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Sebaliknya, jika kesehatan ibu mengalami gangguan, akan memberikan pengaruh kurang baik bagi janin yang dikandungnya dan anak yang dilahirkannya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).



## **B. Indonesia Emas 2045**

Indonesia Emas 2045, 100 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia bercita-cita menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Visi Indonesia 2045 guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Ringkasan Eksekutif visi Indonesia 2045 Final, Bambang P.S. Brodjonegoro Menteri yang bertugas saat itu menyatakan bahwa “Secara keseluruhan Visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia ...” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Visi Indonesia tahun 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019) terdiri dari empat pilar, yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pilar pembangunan ini terdiri dari: (a) percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, (b) peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, (c) peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, (d) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, dan (e) reformasi ketenagakerjaan.

## 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan: (a) peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, (b) percepatan industri dan pariwisata, (c) pembangunan ekonomi maritime, (d) pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, (e) pemantapan ketahanan energi dan air, dan (f) komitmen terhadap lingkungan hidup.

## 3. Pemerataan Pembangunan

Pembangunan yang merata dengan: (a) percepatan pengentasan kemiskinan, (b) pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, (c) pemerataan pembangunan

wilayah, dan (d) pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

#### 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar keempat diwujudkan dengan: (a) demokrasi substantive, (b) reformasi kelembagaan dan birokrasi, (c) penguatan system hokum nasional dan antikorupsi, (d) politik luar negeri bebas aktif, dan (e) penguatan ketahanan dan keamanan.

Terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang tertuang dalam visi Indonesia tersebut ditentukan salah satunya oleh sumber daya manusia usia produktif yang saat ini adalah generasi Y (lahir 1981-1996) dan generasi Z (lahir 1997-2012) (Anju Nofarof Hasudungan & Yusuf Kurniawan, 2018). Selain dua generasi tersebut, generasi Alpha (lahir 2010/2011 s.d. sekarang) juga menjadi penentu, sebagaimana nanti tahun 2045 menjadi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Karena pentingnya peran generasi pemegang estafet kepemimpinan dan penggerak ekonomi ini, maka

dibutuhkan peran pemangku kepentingan untuk menyiapkan segala fasilitas baik pendidikan maupun kesehatan (Nuraini, 2023).

Kesehatan menjadi faktor paling penting dan pusat perhatian. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga, hal utama yang menjadi syarat untuk melakukan berbagai kegiatan, baik pendidikan, pemerintahan, maupun kegiatan ekonomi. Pengetahuan dan penerapan tentang protokol kesehatan adalah hal dasar yang paling tidak harus dimengerti oleh setiap warga negara, selain itu menjaga kesehatan diri dari berbagai penyakit tidak menular juga penting diketahui demi generasi penerus sehat kuat yang nantinya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 (Nuraini, 2023).

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat adalah salah satu dari bagian pembangunan manusia dan penguasaan iptek pada pilar pembangunan Indonesia 2045. Peningkatan kesehatan masyarakat yang dimaksud di antaranya adalah derajat kesehatan dan gizi

masyarakat Indonesia dengan rata-rata usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun, penyakit HIV/AIDS, TBC, dan penyakit tidak menular lainnya menurun, malaria tereliminasi dari seluruh kabupaten/kota, dan balita stunting menurun menjadi 5 persen (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Di antara cita-cita bidang kesehatan tersebut adalah menurunnya balita stunting, yang mana hal tersebut dapat dicegah dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak.

Edukasi kesehatan reproduksi yang minim berdampak pada berbagai gangguan kesehatan alat reproduksi seperti penyakit HIV/AIDS, sifilis, gonore, bahkan gangguan pertumbuhan janin yang berakibat stunting bayi bahkan balita. Hal ini diperparah dengan stigma masyarakat yang menganggap pembicaraan mengenai alat reproduksi, baik mengenai cara menjaga kebersihan, kesehatan, apalagi fungsinya adalah sesuatu yang tabu (Nuraini, 2023).

Pengetahuan kesehatan reproduksi sebaiknya diketahui sejak dini, salah satunya melalui

pendidikan. Pendidikan seks anak diberikan dengan tujuan pengenalan organ, cara merawat, dan yang paling penting menghindari adanya perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Materi pembelajaran tentang organ reproduksi manusia diberikan di bangku Sekolah Dasar (SD) sejak pemberlakuan kurikulum 2013. Pemberian materi tersebut diharapkan anak siap menghadapi perubahan yang akan terjadi pada dirinya ketika tiba masa remaja (Nuraini, 2023).

## **BAB IV**

### **INDIKATOR EKONOMI PADA BONUS DEMOGRAFI**

Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk yang terlalu muda atau terlalu tua. Hal ini dapat menjadi peluang besar bagi suatu negara jika dimanfaatkan dengan baik. Indikator ekonomi yang relevan dalam konteks bonus demografi meliputi:

#### **A. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Bonus demografi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika penduduk usia kerja secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara biasanya simultan dengan kenaikan taraf hidup warganya. Secara ontologis, tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada suatu desa/dukuh/kampung/*village*, kelurahan/*ward*, kecamatan/*sub-district*, kabupaten/kota

(*regency/city*), provinsi (*province*), sampai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang kerap dikenal dengan *economic growth of a country*.

Ontologi merupakan elemen fundamental dalam filsafat, sering kali menjadi bagian dari domain metafisika, yang sendiri merupakan subdisiplin dalam bidang filsafat. Epistemologi adalah cabang ilmu yang terfokus pada teori pengetahuan, sementara aksiologi adalah bidang penelitian yang berkaitan dengan nilai dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam konteks ontologi, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui sudut pandang tentang eksistensi dan sifat dasar dari fenomena ekonomi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan apa yang ada dan sifat dasar dari kenyataan. Berikut adalah beberapa pendekatan ontologis yang relevan untuk memahami pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yakni sebagai berikut:

1. Realisme ontologis: Pendekatan ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi adalah entitas yang nyata dan eksis secara



objektif. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dan diamati sebagai fenomena yang independen dari persepsi manusia. Data ekonomi yang dihasilkan dari pendekatan ini dianggap sebagai representasi dari kenyataan objektif (Acemoglu & Rastrepo. 2017).

2. Konstruktivisme sosial: Konstruktivisme sosial berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah konstruksi sosial yang bergantung pada persepsi, pemahaman, dan representasi manusia. Dalam pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari tindakan dan interpretasi manusia, dan data ekonomi dapat dilihat sebagai hasil dari konvensi sosial.
3. Materialisme dialektis: Pendekatan ini, yang terkait dengan filsafat Marxisme, melihat pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari proses material dan hubungan produksi dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tercermin dalam perubahan struktur ekonomi dan hubungan kelas sosial.

4. Filsafat fenomenologi: Pendekatan fenomenologi menekankan pengalaman subjektif individu dan bagaimana individu mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, dalam konteks ini, adalah fenomena yang dipersepsikan dan diterjemahkan secara subjektif oleh individu.
5. Pluralisme ontologis: Pendekatan ini mengakui bahwa ada berbagai cara untuk memahami eksistensi dan sifat pertumbuhan ekonomi. Ini mencerminkan keragaman pandangan ontologis dalam studi ekonomi, di mana beberapa ekonom mungkin menganut sudut pandang yang lebih realis sementara yang lain lebih cenderung ke konstruktivisme atau sudut pandang lainnya. Pendekatan ontologis mempengaruhi cara kita memandang pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kita memahami sifat dasar dari konsep ini. Keputusan ontologis tersebut juga dapat memengaruhi metodologi penelitian ekonomi, pengukuran pertumbuhan ekonomi, dan cara interpretasi data ekonomi. Selain itu,

pemahaman ontologis individu atau kelompok dalam masyarakat juga dapat memengaruhi pandangan mereka tentang peran dan makna pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan mereka (Bloom & Canning, 2003).

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipahami dan ditempuh melalui berbagai metode dan pendekatan epistemologis. Beberapa metode dan cara yang digunakan untuk memahami dan mengukur pertumbuhan ekonomi negara termasuk: Pendekatan statistik: Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB), inflasi, pengangguran, investasi, dan lainnya. Data ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, yaitu:

1. Pendekatan teori ekonomi: Pada pendekatan teori ekonomi, seperti teori pertumbuhan ekonomi atau makroekonomi, membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori-teori ini dapat digunakan untuk meramalkan atau menjelaskan

tingkat pertumbuhan. Pendekatan historis: Untuk memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mempelajari sejarah ekonominya. Ini termasuk analisis perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang telah terjadi dalam jangka waktu tertentu.

2. Pendekatan sosiologis: Menggunakan metode sosiologi untuk memahami bagaimana masyarakat dan budaya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup aspek-aspek seperti norma sosial, struktur sosial, dan interaksi sosial.
3. Pendekatan geografis: Geografi ekonomi mempertimbangkan faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan infrastruktur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
4. Pendekatan lingkungan: Faktor-faktor lingkungan seperti kebijakan lingkungan, efisiensi energi, dan keberlanjutan dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

5. Pendekatan politik: Faktor politik, seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan tingkat korupsi, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
6. Pendekatan kualitatif: Selain data kuantitatif, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek non-terukur dari pertumbuhan ekonomi, seperti perasaan dan persepsi masyarakat terkait dengan tingkat pertumbuhan.
7. Terakhir, pendekatan multidisiplin: Pendekatan ini menggabungkan berbagai metode di atas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi. Pemahaman tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali memerlukan kombinasi dari beberapa metode dan pendekatan di atas. Pendekatan epistemologi untuk memahami pertumbuhan ekonomi berkembang seiring waktu dan mungkin bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, data yang tersedia, dan konteks ekonomi yang diteliti (Lee, 2003).

Dalam konteks aksiologi, pertumbuhan ekonomi seringkali dievaluasi berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu, masyarakat, atau entitas yang melakukan evaluasi. Nilai-nilai ini dapat bervariasi dari satu orang atau kelompok ke kelompok lain, dan berikut adalah beberapa pandangan aksiologis yang berpotensi memengaruhi penilaian tentang tingkat pertumbuhan ekonomi:

1. Nilai kesejahteraan sosial: Beberapa individu atau masyarakat mungkin menilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial yang dihasilkannya. Mereka mungkin melihat peningkatan tingkat penghasilan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan kemiskinan sebagai indikator penting dari pertumbuhan yang positif.
2. Nilai keadilan sosial: Bagi orang-orang yang mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang merata dan tidak menghasilkan ketimpangan ekonomi yang besar

mungkin dianggap sebagai tujuan yang lebih mulia daripada pertumbuhan yang cepat namun tidak merata.

3. Nilai lingkungan: Aksiologi yang menekankan pelestarian lingkungan akan menilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan dampaknya pada lingkungan alam. Pertumbuhan yang merusak lingkungan atau memperburuk perubahan iklim mungkin dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan.
4. Nilai kualitas hidup: Beberapa individu mungkin menilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan perbaikan kualitas hidup, termasuk aspek seperti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, akses ke budaya dan rekreasi, dan kebebasan individu.
5. Nilai kebebasan ekonomi: Bagi penganut nilai-nilai kebebasan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan deregulasi, privatisasi, dan kebijakan pasar bebas mungkin dianggap sebagai tujuan utama.

6. Nilai keberlanjutan: Masyarakat yang memegang nilai-nilai keberlanjutan akan menilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan aksiologis ini mencerminkan keragaman pandangan yang dapat muncul ketika menilai tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, nilai-nilai tersebut mungkin berubah seiring waktu dan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pengukuran dan penilaian tingkat pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan berbagai perspektif aksiologis yang ada dalam masyarakat 5.0 (Shaddiq et al., 2021).

## **B. Tingkat Pengangguran**

Bonus demografi dapat menghasilkan bonus ekonomi jika tingkat pengangguran relatif rendah. Tingkat pengangguran yang tinggi di antara



penduduk usia kerja dapat menghambat potensi ekonomi. Dalam konteks ontologi, tingkat pengangguran adalah fenomena sosial yang dapat diinterpretasikan melalui berbagai sudut pandang ontologis. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat dan eksistensi entitas atau fenomena. Berikut adalah beberapa pendekatan ontologis yang relevan untuk memahami tingkat pengangguran, yaitu:

1. Realisme ontologis: Pendekatan ini menganggap tingkat pengangguran sebagai entitas yang eksis secara obyektif dalam kenyataan. Pengangguran dapat diukur dan diamati sebagai fenomena yang ada secara independen dari persepsi manusia. Data pengangguran dianggap sebagai representasi objektif dari kenyataan ekonomi.
2. Konstruktivisme sosial: Konstruktivisme sosial berpendapat bahwa tingkat pengangguran adalah konstruksi sosial yang bergantung pada persepsi, definisi, dan konvensi sosial. Dalam pendekatan ini, pengangguran adalah hasil dari

tindakan dan interpretasi manusia, dan data pengangguran dapat dilihat sebagai hasil dari konvensi sosial yang menggambarkan siapa yang dianggap sebagai penganggur.

3. Filsafat fenomenologi: Pendekatan fenomenologi menekankan pengalaman subjektif individu terhadap pengangguran. Tingkat pengangguran, dalam konteks ini, adalah fenomena yang dipersepsikan dan dialami oleh individu secara subjektif. Dalam pandangan ini, pengangguran dapat dilihat sebagai pengalaman individu yang mencerminkan realitas mereka.
4. Materialisme dialektis: Pendekatan ini, terkait dengan filsafat Marxisme, melihat tingkat pengangguran sebagai hasil dari hubungan produksi dan struktur ekonomi dalam masyarakat. Pengangguran tercermin dalam hubungan antara kelas sosial, kepemilikan produksi, dan distribusi sumber daya.
5. Pluralisme ontologis: Seperti dalam banyak konteks ontologis, pengangguran dapat

dipandang melalui berbagai sudut pandang. Beberapa orang mungkin mengambil pendekatan yang lebih realis, sementara yang lain cenderung ke sudut pandang konstruktivis atau sudut pandang lainnya. Pendekatan ontologis ini mempengaruhi cara kita memahami dan mendekati masalah pengangguran dalam analisis ekonomi dan sosiologis. Keputusan ontologis yang dianut individu atau kelompok dalam masyarakat juga dapat memengaruhi cara mereka merespons masalah pengangguran dan solusi yang mereka ajukan. Oleh karena itu, pemahaman ontologis yang mendasari pandangan tentang pengangguran dapat memiliki implikasi penting dalam pengembangan kebijakan dan tindakan sosial.

Tingkat pengangguran adalah konsep ekonomi yang mengacu pada persentase individu yang mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil menemukannya dalam angkatan kerja suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan

statistik sosial untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja dalam masyarakat tertentu bekerja atau tidak bekerja. Dalam epistemologi, kita dapat melihat tingkat pengangguran sebagai bagian dari pengumpulan dan pemahaman pengetahuan tentang dunia, meskipun ini bukan topik utama dalam epistemologi. Di bawah ini adalah beberapa elemen epistemologi yang dapat diterapkan pada pemahaman tentang tingkat pengangguran:

1. Sumber pengetahuan: Dalam epistemologi, kita cenderung bertanya dari mana kita memperoleh pengetahuan. Dalam konteks tingkat pengangguran, kita mendapatkan pengetahuan ini dari sumber seperti lembaga statistik pemerintah, survei, atau penelitian ekonomi. Pertanyaan ini mencerminkan konsep sumber pengetahuan dalam epistemologi.
2. Justifikasi pengetahuan: Dalam epistemologi, kita mengevaluasi bagaimana kita membenarkan keyakinan kita. Dalam kasus pengukuran tingkat pengangguran, justifikasi berhubungan dengan metodologi pengumpulan

data, pengujian, dan analisis statistik yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka tersebut. Ini mencakup konsep justifikasi dalam epistemologi.

3. Ketidakpastian dan keraguan: Epistemologi mencakup pertanyaan tentang ketidakpastian dalam pengetahuan. Dalam pemahaman tingkat pengangguran, kita perlu mengakui bahwa data ini tidak selalu sempurna dan terkadang terdapat ketidakpastian dalam angka-angka tersebut. Ini mencerminkan pemikiran tentang ketidakpastian dalam epistemologi.
4. Kriteria kebenaran: Dalam epistemologi, kita juga mempertimbangkan kriteria kebenaran atau keabsahan pengetahuan. Dalam konteks tingkat pengangguran, kita perlu mempertimbangkan apakah data ini benar atau valid dan apa kriteria yang digunakan untuk menilainya.
5. Pemikiran kritis: Epistemologi menggalakkan pemikiran kritis. Dalam konteks pengukuran tingkat pengangguran, kita dapat menggunakan pemikiran kritis untuk menilai metodologi,

sumber data, atau penafsiran angka-angka ini. Meskipun tingkat pengangguran adalah topik ekonomi dan statistik sosial yang tidak secara langsung terkait dengan epistemologi, prinsip-prinsip epistemologi, seperti sumber pengetahuan, justifikasi, ketidakpastian, kriteria kebenaran, dan pemikiran kritis, dapat digunakan untuk lebih mendalam dalam pemahaman dan evaluasi data yang digunakan dalam konteks ini. Dengan cara ini, epistemologi dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan dan analisis berdasarkan data tentang tingkat pengangguran.

Aksiologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan studi tentang nilai dan etika. Ini fokus pada penelitian nilai-nilai, termasuk apa yang dianggap baik dan buruk, dan bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi tindakan manusia. Dalam konteks tingkat pengangguran, aksiologi dapat membantu kita memahami aspek-aspek etika dan nilai-nilai yang terkait dengan isu ini. Di bawah ini adalah

penjelasan tentang tingkat pengangguran dalam perspektif aksiologi:

1. Pengangguran sebagai isu sosial: Dalam perspektif aksiologi, tingkat pengangguran dapat dilihat sebagai isu sosial yang memunculkan pertanyaan etika. Bagaimana masyarakat seharusnya merespons atau membantu individu yang menganggur? Apakah ada nilai-nilai yang menggarisbawahi pentingnya memberikan kesempatan kerja kepada semua orang?
2. Nilai keadilan: Aksiologi sering mencakup pemikiran tentang keadilan sosial. Ketika kita membahas tingkat pengangguran, kita dapat menilai apakah ada ketidaksetaraan dalam peluang kerja dan apakah ada nilai-nilai keadilan yang terabaikan dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kesetaraan dan kesempatan yang adil dapat menjadi perhatian aksiologis dalam hal ini.
3. Nilai solidaritas: Solidaritas adalah konsep penting dalam aksiologi. Dalam konteks tingkat pengangguran, mungkin ada nilai solidaritas yang mendorong masyarakat untuk mendukung

individu yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ini dapat mengarah pada diskusi tentang bagaimana masyarakat merespons isu pengangguran dan apakah ada nilai-nilai solidaritas yang mendasarinya.

4. Etika dalam kebijakan: Isu-isu kebijakan yang berhubungan dengan pengangguran, seperti program sosial, asuransi pengangguran, dan pelatihan keterampilan, dapat dianalisis dari sudut pandang aksiologi. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat? Apakah mereka memadukan nilai-nilai seperti kepedulian sosial, kesetaraan, atau keadilan?
5. Pemahaman Terhadap Individu yang Menganggur: Dalam pandangan aksiologi, kita dapat mengkaji cara individu yang menganggur diperlakukan dan dipahami oleh masyarakat. Apakah ada stigma yang melekat pada pengangguran? Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai empati dan pengertian



dalam interaksi dengan individu yang menghadapi pengangguran?

Dalam esensi, aksiologi dapat membantu kita menggali nilai-nilai yang mendasari pemahaman dan tindakan kita terkait dengan tingkat pengangguran. Ini dapat membantu membentuk diskusi tentang etika, kebijakan, dan tanggung jawab sosial dalam mengatasi masalah ini dalam masyarakat.

### **C. Partisipasi Angkatan Kerja**

Persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam angkatan kerja adalah indikator penting. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar potensi bonus demografi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan sifat eksistensi dan realitas. Dalam konteks partisipasi angkatan kerja, kita dapat mempertimbangkan aspek-aspek ontologi berikut:

1. Eksistensi angkatan kerja: Dalam perspektif ontologi, kita dapat mengajukan pertanyaan tentang eksistensi dan realitas angkatan kerja. Angkatan kerja adalah entitas sosial yang eksis

dalam masyarakat. Ontologi membantu kita memahami apakah angkatan kerja ini memiliki eksistensi yang independen atau apakah itu hanya merupakan konsep yang ada dalam pemikiran manusia.

2. Individu dan angkatan kerja: Ontologi juga memungkinkan kita untuk mempertimbangkan hubungan antara individu dan angkatan kerja. Apakah angkatan kerja adalah entitas yang mandiri, atau apakah itu terdiri dari individu yang berkontribusi ke dalamnya? Ini menggambarkan pemahaman ontologis tentang bagaimana angkatan kerja berinteraksi dengan individu-individu yang ada di dalamnya.
3. Sifat entitas sosial: Ontologi mempertanyakan sifat entitas sosial, seperti angkatan kerja. Apakah angkatan kerja hanya ada sebagai konsep atau apakah itu memiliki eksistensi fisik yang konkret? Pertanyaan ini mencerminkan pemikiran ontologis tentang realitas entitas sosial.

4. Peran dan hubungan: Ontologi juga membantu kita memahami peran dan hubungan di dalam angkatan kerja. Bagaimana entitas ini terbentuk dan berinteraksi? Bagaimana peran individu dalam menciptakan dan memelihara angkatan kerja? Ini berkaitan dengan pandangan ontologis tentang hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem.
5. Keterkaitan dengan ekonomi dan sosial: Ontologi memungkinkan kita untuk menggali bagaimana angkatan kerja terkait dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Bagaimana struktur angkatan kerja mencerminkan realitas sosial dan ekonomi? Ini mencerminkan pemahaman ontologis tentang hubungan antara realitas sosial dan entitas seperti angkatan kerja.

Dengan menerapkan perspektif ontologi, kita dapat memahami realitas dan eksistensi angkatan kerja, serta cara angkatan kerja berinteraksi dengan individu dan masyarakat secara lebih mendalam. Ontologi membantu kita menjawab pertanyaan

tentang apa yang ada dan bagaimana kita memahami eksistensi entitas sosial seperti angkatan kerja.

Dalam konteks epistemologi, partisipasi angkatan kerja dapat dilihat sebagai topik yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan justifikasi terhadap proses dan konsep yang terkait dengan angkatan kerja. Berikut adalah cara melihat partisipasi angkatan kerja dari sudut pandang epistemologi:

1. Pemahaman pengetahuan tentang angkatan kerja: Epistemologi mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa yang dapat kita ketahui tentang konsep seperti angkatan kerja. Dalam hal ini, kita dapat mengkaji bagaimana individu dan masyarakat memahami dan mendefinisikan angkatan kerja, serta bagaimana pengetahuan ini dibangun dan dikomunikasikan.
2. Sumber pengetahuan: Epistemologi mencakup pertanyaan tentang sumber-sumber pengetahuan. Bagaimana kita memperoleh

informasi tentang angkatan kerja? Ini bisa melibatkan data statistik, riset akademis, pengalaman pribadi, atau berbagai sumber lainnya. Pertanyaan ini membahas sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam pemahaman tentang angkatan kerja.

3. Justifikasi pengetahuan: Dalam epistemologi, kita mempertimbangkan bagaimana kita dapat membenarkan keyakinan kita. Bagaimana kita dapat meyakinkan diri bahwa apa yang kita tahu tentang angkatan kerja adalah benar? Ini berkaitan dengan konsep justifikasi dalam epistemologi, di mana kita mengevaluasi dasar dan bukti untuk keyakinan kita.
4. Sifat pengetahuan tentang angkatan kerja: Pertanyaan epistemologi lainnya adalah apakah pengetahuan tentang angkatan kerja bersifat objektif atau bersifat subjektif. Apakah ada "fakta" yang tetap tentang angkatan kerja, atau apakah pengetahuan tentang angkatan kerja dipengaruhi oleh perspektif individu atau pandangan sosial?

5. Pengaruh epistemologi pada kebijakan dan tindakan: Bagaimana epistemologi memengaruhi kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan angkatan kerja? Pertimbangan etis, metode pengukuran, dan pemahaman tentang kausalitas dapat semuanya dipengaruhi oleh kerangka epistemologi yang diterapkan dalam konteks angkatan kerja.

Jadi, dalam konteks epistemologi, partisipasi angkatan kerja bisa dilihat sebagai cara kita memahami dan memperoleh pengetahuan tentang aspek-aspek seperti pengangguran, ketenagakerjaan, dan dinamika tenaga kerja. Epistemologi membantu kita memeriksa asal-usul, sumber, validitas, dan sifat pengetahuan yang kita miliki tentang angkatan kerja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemikiran, kebijakan, dan tindakan dalam bidang ini. Dalam point of view (POV)/perspektif dan konteks aksiologi, partisipasi angkatan kerja dapat dilihat sebagai masalah yang melibatkan penilaian dan refleksi tentang nilai-nilai yang mendasarinya. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berkaitan

dengan studi tentang nilai-nilai, etika, dan pertimbangan moral. Berikut adalah beberapa cara melihat partisipasi angkatan kerja dari sudut pandang aksiologi:

1. Pertimbangan etis dalam partisipasi angkatan kerja: Aksiologi mencakup penilaian nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi angkatan kerja dapat melibatkan pertimbangan etis, seperti keadilan dalam peluang kerja, perlakuan adil terhadap pekerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Dalam perspektif aksiologi, kita mempertimbangkan apakah partisipasi angkatan kerja mencerminkan atau melanggar nilai-nilai etis.
2. Nilai solidaritas: Aksiologi sering melibatkan pemikiran tentang solidaritas sosial. Bagaimana partisipasi angkatan kerja memengaruhi solidaritas di masyarakat? Apakah ada nilai-nilai solidaritas yang harus diperhatikan dalam hubungan antara pekerja, majikan, dan masyarakat pada umumnya?

3. Keadilan sosial: Aksiologi juga mengangkat isu-isu keadilan sosial. Pertanyaan-pertanyaan tentang distribusi yang adil dari peluang kerja, akses ke pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pusat perhatian aksiologi dalam kaitannya dengan partisipasi angkatan kerja.
4. Tanggung jawab moral: Dalam perspektif aksiologi, kita juga mengevaluasi tanggung jawab moral individu dan entitas sosial terkait dengan angkatan kerja. Apakah ada tanggung jawab moral untuk menyediakan peluang kerja, lingkungan kerja yang aman, dan kondisi kerja yang layak? Bagaimana individu dan organisasi memenuhi tanggung jawab ini?
5. Pertimbangan etis dalam kebijakan tenaga kerja: Bagaimana kebijakan pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya dalam kaitannya dengan tenaga kerja mencerminkan atau melanggar nilai-nilai etis? Aksiologi membantu kita menilai apakah kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan perhatian terhadap nilai-nilai



seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Partisipasi angkatan kerja, dalam perspektif aksiologi, menjadi subjek refleksi nilai dan etika yang berkaitan dengan pemberdayaan, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam konteks dunia kerja. Nilai-nilai ini menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi dan membimbing tindakan dan kebijakan yang terkait dengan tenaga kerja.

#### **D. Keterampilan dan Pendidikan**

Keterampilan dan tingkat pendidikan dari penduduk usia kerja dapat memengaruhi sejauh mana bonus demografi dapat dimanfaatkan. Tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang baik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ontologi, kita dapat memahami keterampilan dan pendidikan sebagai entitas atau konsep yang berkaitan dengan sifat eksistensi dan realitas. Berikut adalah cara melihat keterampilan dan pendidikan dari sudut pandang ontologi:

1. Keterampilan sebagai entitas yang nyata: Dalam ontologi, kita dapat menganggap keterampilan sebagai entitas yang eksis dalam realitas. Keterampilan adalah sesuatu yang nyata, meskipun mereka tidak memiliki eksistensi fisik seperti benda-benda. Mereka adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Hubungan antara keterampilan dan individu: Keterampilan ada dalam hubungan dengan individu. Mereka merupakan bagian dari realitas individu, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan dunia dan mencapai tujuan mereka. Keterampilan tidak ada secara terpisah dari individu; mereka merupakan atribut individu.
3. Pendidikan sebagai proses pembentukan keterampilan: Ontologi juga membantu kita memahami pendidikan sebagai proses yang berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan keterampilan. Pendidikan adalah realitas yang mendukung pertumbuhan keterampilan dalam individu. Proses pendidikan

membantu menghadirkan keterampilan dan pengetahuan dalam realitas individu.

4. Keterampilan sebagai konstruk sosial: Di sisi lain, ontologi juga memungkinkan kita untuk mempertimbangkan keterampilan sebagai konstruk sosial. Maksudnya, apa yang dianggap sebagai "keterampilan" dapat berbeda dalam berbagai budaya dan konteks sosial. Keterampilan tidak selalu memiliki eksistensi yang sama dalam semua realitas sosial.
5. Pendidikan sebagai bagian dari realitas sosial: Pendidikan juga dapat dilihat sebagai entitas yang ada dalam realitas sosial. Proses pendidikan terkait dengan berbagai norma, nilai, dan struktur sosial yang mendefinisikan bagaimana ilmu dan keterampilan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Melalui perspektif ontologi, kita dapat lebih mendalam memahami keterampilan sebagai atribut individu yang ada dalam hubungannya dengan realitas individu. Pendidikan juga dapat dianggap sebagai bagian integral dari realitas sosial yang

berkontribusi pada perkembangan keterampilan dan pengetahuan individu dalam masyarakat. Ontologi membantu kita menjelajahi eksistensi dan keterkaitan keterampilan dan pendidikan dalam realitas yang lebih luas.

Dalam perspektif epistemologi, kita dapat memahami keterampilan dan pendidikan dalam konteks pengetahuan, pembelajaran, dan cara kita memperoleh, memahami, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat keterampilan dan pendidikan dari sudut pandang epistemologi:

1. Pengembangan pengetahuan melalui pendidikan: Epistemologi mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Pendidikan adalah salah satu cara utama di mana pengetahuan diperoleh. Dalam epistemologi, kita mempertimbangkan bagaimana pendidikan memfasilitasi pembentukan, peningkatan, dan penggunaan pengetahuan, termasuk pengetahuan yang mendasari keterampilan.

2. Proses pembelajaran: Epistemologi membahas proses pembelajaran, yaitu bagaimana individu memahami dan internalisasi pengetahuan. Keterampilan sering kali terkait dengan pemahaman dan praktik yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Bagaimana individu mengembangkan keterampilan mereka, dan bagaimana proses belajar memengaruhi pemahaman mereka tentang keterampilan tersebut adalah pertanyaan yang relevan dalam epistemologi.
3. Justifikasi keterampilan: Bagaimana kita bisa yakin bahwa seseorang memiliki keterampilan tertentu? Epistemologi mencakup konsep justifikasi, di mana kita mempertimbangkan dasar-dasar dan bukti yang mendukung keyakinan kita tentang keterampilan seseorang. Bagaimana kita membenarkan atau menguji keterampilan dalam epistemologi adalah pertimbangan penting.
4. Penggunaan pengetahuan dalam keterampilan: Keterampilan sering kali melibatkan penggunaan

pengetahuan dalam konteks praktis. Bagaimana pengetahuan diaplikasikan dalam tindakan dan penggunaan keterampilan adalah subjek penelitian epistemologi. Bagaimana pengetahuan berperan dalam pengembangan, pemahaman, dan penerapan keterampilan adalah pertanyaan yang relevan dalam epistemologi.

5. Kriteria kebenaran dan keahlian: Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang kriteria kebenaran. Dalam konteks keterampilan, bagaimana kita menilai apakah seseorang adalah ahli dalam bidang tertentu atau memiliki keterampilan yang sah? Apakah ada standar atau kriteria yang diterapkan untuk mengukur keterampilan atau pengetahuan yang mendukungnya?

Melalui perspektif epistemologi, kita memahami keterampilan sebagai bagian integral dari pengetahuan dan bagaimana pendidikan berperan dalam pembentukan, pemahaman, dan penggunaan pengetahuan ini dalam praktik.

Epistemologi membantu kita menjelajahi cara individu memperoleh, mengaplikasikan, dan memahami keterampilan dalam kerangka pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas.

Dalam perspektif aksiologi, keterampilan dan pendidikan dapat dipandang sebagai subjek yang terkait erat dengan pertimbangan nilai-nilai, etika, dan prinsip moral. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat keterampilan dan pendidikan dari sudut pandang aksiologi:

1. Nilai pendidikan: Aksiologi mencakup penilaian nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Pertanyaan tentang tujuan dan makna pendidikan adalah pertimbangan etika yang kunci dalam aksiologi. Apakah pendidikan seharusnya bertujuan untuk menciptakan keterampilan tertentu, ataukah ada nilai-nilai moral yang lebih luas yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan?
2. Pendidikan dan etika: Aksiologi memungkinkan kita untuk mengevaluasi pendidikan dari sudut pandang etika. Bagaimana etika dan moralitas

berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan pendidikan? Apakah pendidikan mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai yang positif? Pertimbangan ini berkaitan dengan nilai dan etika dalam pendidikan.

3. Nilai keterampilan: Dalam aksiologi, kita juga menilai nilai-nilai yang terkait dengan keterampilan. Apakah keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan memiliki nilai moral atau etis? Bagaimana penggunaan keterampilan tersebut dalam masyarakat memengaruhi nilai-nilai sosial dan etika?
4. Tanggung jawab moral dalam pendidikan: Aksiologi mengangkat isu-isu tanggung jawab moral dalam pendidikan. Bagaimana individu dan institusi bertanggung jawab atas pendidikan dan pembentukan keterampilan? Apakah ada tanggung jawab etis dalam memastikan bahwa pendidikan mendukung nilai-nilai moral yang positif?
5. Pendidikan dan kontribusi sosial: Bagaimana pendidikan berkontribusi pada nilai-nilai dan



etika dalam masyarakat lebih luas? Apakah pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk warga yang bertanggung jawab dan etis? Apakah keterampilan yang diajarkan melibatkan kontribusi positif terhadap masyarakat?

Melalui perspektif aksiologi, keterampilan dan pendidikan dapat dilihat sebagai aspek yang berkaitan erat dengan pertimbangan nilai-nilai, etika, dan prinsip moral. Ini membantu kita untuk mengevaluasi peran pendidikan dalam membentuk individu, masyarakat, dan nilai-nilai yang terkait dengan pengembangan keterampilan. Aksiologi menghadirkan kerangka kerja etis untuk mengevaluasi dan membimbing pendidikan dan pengembangan keterampilan.

## **E. Investasi dalam Infrastruktur dan Pendidikan**

Negara-negara dengan bonus demografi yang tinggi perlu melakukan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan untuk memastikan

bahwa penduduk usia kerja memiliki kesempatan yang baik untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Dalam perspektif ontologi, kita dapat memahami investasi dalam infrastruktur dan pendidikan sebagai permasalahan yang melibatkan pertanyaan tentang eksistensi, realitas, dan sifat dasar dari entitas dan konsep yang terlibat. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dari sudut pandang ontologi:

1. Eksistensi infrastruktur: Dalam ontologi, kita dapat mempertanyakan apakah infrastruktur memiliki eksistensi yang mandiri. Apakah infrastruktur adalah entitas yang eksis dalam realitas fisik, ataukah itu hanya merupakan hasil konstruksi manusia dalam pemikiran dan praktik sosial? Pertanyaan ini membantu kita memahami sifat eksistensi infrastruktur sebagai sesuatu yang dapat memengaruhi realitas kita.
2. Hubungan antara infrastruktur dan masyarakat: Bagaimana infrastruktur berhubungan dengan masyarakat dan realitas sosial? Infrastruktur,

seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan umum, adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pertanyaan tentang bagaimana infrastruktur menjadi bagian dari realitas sosial, dan bagaimana hubungannya dengan individu dan komunitas, mencerminkan pertimbangan ontologis.

3. Eksistensi pendidikan: Ontologi juga membantu kita memahami eksistensi pendidikan. Apakah pendidikan adalah entitas yang ada secara mandiri atau hanya konsep sosial yang didefinisikan oleh praktik dan norma manusia? Bagaimana pendidikan berinteraksi dengan realitas individu dan masyarakat?
4. Peran pendidikan dalam Pembentukan Pengetahuan: Bagaimana pendidikan berperan dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman individu? Proses pendidikan membantu membentuk realitas pengetahuan individu, dan pertanyaan ontologis mungkin termasuk tentang bagaimana pengetahuan

didefinisikan, diperoleh, dan berinteraksi dengan realitas lainnya.

5. Pengaruh infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kualitas Hidup: Bagaimana infrastruktur dan pendidikan memengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat? Pertimbangan ontologis dapat mencakup bagaimana eksistensi infrastruktur dan pendidikan berdampak pada realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan perspektif ontologi, kita dapat menjelajahi eksistensi dan dampak infrastruktur dan pendidikan dalam realitas kita. Ontologi membantu kita memahami bagaimana infrastruktur dan pendidikan menjadi bagian integral dari realitas fisik dan sosial kita, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan entitas dan konsep lainnya dalam realitas ini. Dalam perspektif epistemologi, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dapat dilihat sebagai proses pengetahuan, pemahaman, dan justifikasi terkait dengan pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat investasi

dalam infrastruktur dan pendidikan dari sudut pandang epistemologi:

1. Pemahaman pengetahuan investasi: Epistemologi membahas cara kita memahami investasi, baik dalam infrastruktur maupun pendidikan. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang jenis investasi apa yang dibutuhkan, kapan, dan di mana? Ini mencakup penilaian data, analisis, dan pemahaman tentang manfaat investasi tersebut.
2. Proses pengambilan keputusan: Investasi dalam infrastruktur dan pendidikan melibatkan proses pengambilan keputusan. Dalam epistemologi, kita mempertanyakan dasar dan bukti yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Bagaimana kita justifikasi dan mendukung keputusan investasi? Bagaimana kita memahami implikasi dan risiko yang terlibat?
3. Sumber pengetahuan: Pertimbangan tentang sumber pengetahuan penting dalam epistemologi. Apakah pengetahuan kita tentang investasi berasal dari data empiris, riset ilmiah,

atau pengalaman praktis? Bagaimana sumber-sumber ini memengaruhi pemahaman kita tentang investasi?

4. Pengaruh paradigma dan kerangka kerja konseptual: Epistemologi juga mempertimbangkan bagaimana paradigma dan kerangka kerja konseptual memengaruhi pemahaman kita tentang investasi. Apakah ada pandangan teoritis tertentu yang membimbing pengambilan keputusan investasi? Bagaimana kerangka kerja ini mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman kita?
5. Evaluasi hasil investasi: Bagaimana kita mengevaluasi hasil investasi dalam infrastruktur dan pendidikan? Pertimbangan epistemologi melibatkan penilaian terhadap pengetahuan yang dihasilkan dari hasil investasi, termasuk bagaimana kita memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan manfaat yang diharapkan.

Melalui perspektif epistemologi, kita dapat memahami investasi dalam infrastruktur dan

pendidikan sebagai proses pengetahuan dan pemahaman. Ini membantu kita mengevaluasi cara kita memperoleh, memahami, dan mengambil keputusan tentang investasi tersebut. Epistemologi memungkinkan kita untuk mempertimbangkan dasar pengetahuan dan bukti yang mendukung investasi dan bagaimana proses ini memengaruhi pemahaman kita tentang investasi dalam masyarakat.

Dalam perspektif aksiologi, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dapat dilihat sebagai permasalahan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dari sudut pandang aksiologi:

1. Nilai-nilai investasi: Aksiologi membahas penilaian nilai-nilai yang mendasari investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Apakah investasi tersebut dianggap bernilai? Pertimbangan etis mencakup pertanyaan tentang apakah investasi tersebut mendukung

tujuan moral yang positif, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik.

2. Etika investasi: Aksiologi juga mempertimbangkan etika investasi. Bagaimana penggunaan dana untuk investasi dalam infrastruktur dan pendidikan memenuhi prinsip-prinsip etika? Apakah investasi tersebut adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial?
3. Nilai pendidikan: Aksiologi membantu kita menilai nilai-nilai yang terkait dengan pendidikan. Pertanyaan etis termasuk apakah pendidikan mempromosikan nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan empati. Bagaimana pendidikan memengaruhi perkembangan etika dan karakter individu?
4. Pertimbangan kemanfaatan sosial: Dalam perspektif aksiologi, kita mempertimbangkan bagaimana investasi dalam infrastruktur dan pendidikan berkontribusi pada kemanfaatan sosial. Bagaimana investasi tersebut



memengaruhi masyarakat secara keseluruhan?  
Apakah investasi ini mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan moral?

5. Tanggung jawab moral dalam investasi: Aksiologi juga mengangkat isu-isu tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan investasi. Bagaimana individu, organisasi, dan pemerintah bertanggung jawab secara moral dalam alokasi dana untuk infrastruktur dan pendidikan? Apakah ada tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa investasi tersebut memenuhi prinsip-prinsip moral yang positif?

Melalui perspektif aksiologi, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dapat dilihat sebagai masalah yang berkaitan dengan penilaian nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang membimbing pengambilan keputusan. Aksiologi membantu kita mengevaluasi apakah investasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dihormati dalam masyarakat dan apakah mereka memenuhi tanggung jawab etis yang relevan.

## **F. Investasi Asing Langsung/*Foreign Direct Investment (FDI)***

Tingkat investasi asing langsung (IAL/FDI) dapat mencerminkan ketertarikan investor asing dalam potensi ekonomi yang ditawarkan oleh bonus demografi.

Dalam perspektif ontologi, foreign direct investment (FDI) dapat dilihat sebagai fenomena ekonomi yang melibatkan pertanyaan tentang eksistensi, realitas, dan sifat dasar dari investasi asing dalam realitas ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa cara melihat investasi asing langsung dari sudut pandang ontologi:

1. Eksistensi investasi asing langsung: Dalam ontologi, kita dapat pertanyakan apakah investasi asing langsung memiliki eksistensi yang mandiri atau hanya merupakan hasil dari tindakan manusia dalam dunia ekonomi. Apakah FDI adalah entitas yang eksis dalam realitas fisik atau hanya konstruksi sosial dalam sistem ekonomi global?

2. Hubungan antara investasi dan entitas ekonomi lainnya: Bagaimana investasi asing langsung berhubungan dengan elemen ekonomi lainnya, seperti perusahaan, pemerintah, dan pasar? Pertanyaan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana FDI berinteraksi dengan realitas ekonomi yang lebih luas.
3. Eksistensi perusahaan multinasional: FDI seringkali melibatkan perusahaan multinasional. Dalam ontologi, kita dapat menanyakan apakah perusahaan multinasional memiliki eksistensi yang mandiri atau hanya merupakan entitas yang berasal dari hukum dan praktik manusia.
4. Peran FDI dalam transformasi ekonomi: Bagaimana FDI memengaruhi struktur ekonomi dan sosial suatu negara atau wilayah? Pertanyaan ini mencakup bagaimana investasi asing langsung berkontribusi pada transformasi dan perkembangan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial.

5. Pengaruh FDI pada dinamika sosial: Investasi asing langsung juga memengaruhi dinamika sosial di wilayah yang menerima investasi. Pertanyaan ontologis mungkin mencakup bagaimana FDI berdampak pada budaya, hubungan sosial, dan tatanan politik.

Melalui perspektif ontologi, kita dapat menjelajahi eksistensi dan dampak investasi asing langsung dalam realitas ekonomi dan sosial kita. Ini membantu kita memahami bagaimana FDI menjadi bagian integral dari realitas global dan bagaimana mereka berinteraksi dengan entitas dan konsep ekonomi lainnya dalam realitas ini.

Dalam perspektif epistemologi, investasi asing langsung / *foreign direct investment* (FDI) dapat dilihat sebagai fenomena ekonomi yang melibatkan pertanyaan tentang pengetahuan, pemahaman, dan justifikasi yang berkaitan dengan FDI. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat investasi asing langsung dari sudut pandang epistemologi:

1. Pemahaman FDI: Epistemologi membahas bagaimana kita memahami FDI. Bagaimana kita

mendefinisikan, mengkategorikan, dan memahami investasi asing langsung? Pertanyaan ini mencakup pemahaman konsep dan fenomena ekonomi yang terkait dengan FDI.

2. Sumber pengetahuan tentang FDI: Bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang FDI? Epistemologi mempertimbangkan sumber-sumber pengetahuan seperti data ekonomi, riset ilmiah, laporan pemerintah, dan pengalaman praktis dalam membentuk pemahaman kita tentang FDI.
3. Proses pengambilan keputusan FDI: Investasi asing langsung melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam epistemologi, kita dapat mempertanyakan bagaimana keputusan untuk berinvestasi dianalisis, dipahami, dan diberi justifikasi. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman mempengaruhi keputusan investasi?
4. Evaluasi dampak FDI: Bagaimana kita mengevaluasi dampak FDI dalam masyarakat dan ekonomi? Pertanyaan ini mencakup

bagaimana pengetahuan dan justifikasi digunakan untuk menilai manfaat, risiko, dan konsekuensi dari investasi asing langsung.

5. Paradigma dan kerangka kerja teoritis: Epistemologi juga mempertimbangkan peran paradigma dan kerangka kerja teoritis dalam pemahaman FDI. Bagaimana teori ekonomi dan konsepsi tentang pembangunan ekonomi memengaruhi pengetahuan dan interpretasi kita tentang FDI?

Melalui perspektif epistemologi, kita memahami FDI sebagai subjek pengetahuan, pemahaman, dan justifikasi dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Ini membantu kita mengevaluasi cara kita memperoleh, memahami, dan mengambil keputusan tentang investasi asing langsung, serta bagaimana pengetahuan dan pemahaman ini memengaruhi tindakan dan kebijakan dalam masyarakat. Epistemologi memungkinkan kita untuk mendalami aspek-aspek pengetahuan dan pemahaman yang mendasari FDI.

Dalam perspektif aksiologi, investasi asing langsung/ *foreign direct investment* (FDI) dapat dilihat sebagai permasalahan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat investasi asing langsung dari sudut pandang aksiologi:

1. Nilai-nilai investasi: Aksiologi membahas penilaian nilai-nilai yang mendasari FDI. Apakah investasi asing langsung dianggap bernilai? Pertimbangan etis mencakup pertanyaan tentang apakah investasi tersebut mendukung tujuan moral yang positif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Etika investasi: Aksiologi juga mempertimbangkan etika investasi. Bagaimana penggunaan dana untuk investasi asing langsung memenuhi prinsip-prinsip etika? Apakah investasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, atau keberlanjutan ekonomi?

3. Pengaruh sosial dan lingkungan: Investasi asing langsung seringkali memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dalam perspektif aksiologi, kita mempertimbangkan apakah investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika lingkungan dan apakah dampaknya pada masyarakat dan lingkungan dihargai secara etis.
4. Tanggung jawab moral dalam investasi: Aksiologi mengangkat isu-isu tentang tanggung jawab moral dalam FDI. Bagaimana perusahaan dan investor bertanggung jawab secara moral dalam memastikan bahwa investasi mereka memberikan manfaat yang positif dan tidak merugikan masyarakat lokal? Apakah ada tanggung jawab etis dalam mengelola investasi asing langsung?
5. Distribusi kemanfaatan: Aksiologi juga mempertimbangkan bagaimana manfaat ekonomi dari FDI didistribusikan di antara masyarakat. Apakah ada pertimbangan etis dalam pembagian manfaat ekonomi, khususnya



dalam hal kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial?

Melalui perspektif aksiologi, investasi asing langsung dapat dilihat sebagai permasalahan yang berkaitan dengan penilaian nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang membimbing pengambilan keputusan. Aksiologi membantu kita mengevaluasi apakah FDI sejalan dengan nilai-nilai etika yang dihormati dalam masyarakat dan apakah mereka memenuhi tanggung jawab moral yang relevan. Ini membantu kita mengadopsi pendekatan etis dalam konteks FDI dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang luas.

### **G. Indikator Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**

Penting untuk memantau indikator ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar, karena bonus demografi dapat menjadi berkah atau kutukan tergantung pada sejauh mana ketimpangan ini dikelola. Dalam perspektif ontologi, indikator ketimpangan sosial dan

ekonomi dapat dilihat sebagai representasi atau pengukuran tentang realitas sosial dan ekonomi yang ada dalam dunia kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang indikator ketimpangan sosial dan ekonomi dari sudut pandang ontologi:

1. Realitas sosial dan ekonomi: Indikator ketimpangan mencerminkan realitas sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Realitas ini mencakup berbagai aspek seperti distribusi kekayaan, akses ke pendidikan, kesempatan pekerjaan, dan akses ke layanan kesehatan. Indikator ketimpangan merinci berbagai aspek ini dalam angka dan data yang dapat diukur.
2. Eksistensi ketimpangan: Dalam ontologi, ketimpangan dianggap sebagai aspek yang ada dalam realitas sosial dan ekonomi. Ini mencakup perbedaan nyata dalam kekayaan, peluang, dan akses yang dialami oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Indikator ketimpangan menjadi cara untuk mengukur dan menggambarkan eksistensi ketimpangan ini.

3. Pengukuran dan representasi: Indikator ketimpangan adalah upaya untuk mengukur dan merepresentasikan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini bisa berupa indeks Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan, tingkat kelulusan sekolah untuk mengukur ketimpangan akses pendidikan, atau angka pengangguran untuk mengukur ketimpangan kesempatan kerja. Indikator ini menciptakan representasi matematis dari ketimpangan yang ada dalam realitas.
4. Keterkaitan dengan realitas sosial: Indikator ketimpangan juga mencerminkan keterkaitan antara berbagai aspek realitas sosial dan ekonomi. Misalnya, ketimpangan pendapatan seringkali terkait dengan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Indikator membantu menggambarkan hubungan antara elemen-elemen ini dalam realitas sosial yang lebih besar.
5. Perubahan dalam realitas: Ketika indikator ketimpangan mengalami perubahan, ini mencerminkan perubahan dalam realitas sosial

dan ekonomi. Perubahan ini bisa berarti peningkatan kesetaraan atau ketidaksetaraan yang semakin meningkat dalam masyarakat. Indikator ini membantu kita memahami evolusi realitas sosial dan ekonomi.

Melalui perspektif ontologi, indikator ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan alat yang membantu kita mengukur, merepresentasikan, dan memahami realitas sosial dan ekonomi yang kompleks dalam masyarakat. Ini membantu dalam penilaian dan pemahaman tentang eksistensi ketimpangan serta dampaknya pada individu dan masyarakat. Indikator ini juga mencerminkan hubungan dan perubahan dalam realitas yang terus berkembang.

Dalam perspektif epistemologi, indikator ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat sebagai alat pengetahuan yang membantu kita memahami dan mengukur aspek-aspek ketimpangan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang indikator

ketimpangan sosial dan ekonomi dari sudut pandang epistemologi:

1. Pengetahuan tentang ketimpangan: Indikator ketimpangan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Mereka memberikan data dan informasi yang menggambarkan tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, akses ke sumber daya, atau peluang hidup.
2. Sumber pengetahuan: Indikator ketimpangan digunakan sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh melalui metode pengukuran dan penelitian. Mereka mencerminkan hasil dari analisis data, survei, dan penelitian yang membantu kita memahami realitas ketimpangan dalam masyarakat.
3. Peran penelitian dan analisis: Dalam epistemologi, penting untuk memahami bagaimana indikator ketimpangan dibentuk melalui metode penelitian dan analisis data. Ini mencakup pemilihan variabel, pengukuran, dan

teknik statistik yang digunakan untuk menghasilkan indikator ini.

4. Konstruksi pengetahuan: Indikator ketimpangan juga menggambarkan konstruksi pengetahuan tentang ketimpangan dalam masyarakat. Mereka adalah hasil dari pemahaman teoritis, konsep, dan kerangka kerja yang digunakan dalam analisis ketimpangan.
5. Interpretasi dan penggunaan pengetahuan: Pengetahuan yang diperoleh dari indikator ketimpangan dapat diinterpretasikan dan digunakan untuk membuat kebijakan, mengidentifikasi masalah sosial, atau memahami tren dalam masyarakat. Ini melibatkan peran epistemologi dalam menggali makna dan dampak dari pengetahuan tersebut.
6. Sumber kritik dan refleksi: Indikator ketimpangan juga dapat menjadi subjek kritik dan refleksi epistemologis. Pertanyaan tentang bagaimana indikator ini dibentuk, apa yang mungkin diabaikan dalam pengukuran, dan apakah

mereka mencerminkan realitas ketimpangan secara lengkap adalah pertimbangan penting.

Melalui perspektif epistemologi, indikator ketimpangan sosial dan ekonomi adalah alat pengetahuan yang membantu kita memahami dan mengukur fenomena ketimpangan dalam masyarakat. Mereka mencerminkan sumber pengetahuan yang dapat digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Penting untuk memahami bagaimana pengetahuan ini dibentuk, diinterpretasikan, dan digunakan dalam pemahaman kita tentang ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif aksiologi, indikator ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat sebagai alat penilaian yang membantu kita mengevaluasi nilai-nilai dan etika yang terkait dengan ketimpangan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang indikator ketimpangan sosial dan ekonomi dari sudut pandang aksiologi:

1. **Pertimbangan nilai:** Indikator ketimpangan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari pemahaman tentang ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah ketimpangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dihormati dalam masyarakat.
2. **Etika dalam pengukuran:** Dalam aksiologi, kita mempertimbangkan etika yang terlibat dalam pengukuran dan analisis ketimpangan. Bagaimana metode pengukuran tersebut mencerminkan etika yang mendasarinya? Apakah metode tersebut adil dan transparan?
3. **Pengaruh pada kesejahteraan sosial:** Indikator ketimpangan juga membantu kita menilai dampak ketimpangan sosial dan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan aksiologis meliputi apakah ketimpangan tersebut berdampak negatif pada nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan.
4. **Kewajiban moral:** Aksiologi membantu kita memahami kewajiban moral yang terkait dengan



ketimpangan. Bagaimana masyarakat, organisasi, dan individu memiliki kewajiban etis dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi? Bagaimana nilai-nilai moral memengaruhi tindakan dan kebijakan yang diadopsi?

5. Distribusi kemanfaatan: Indikator ketimpangan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan distribusi kemanfaatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Apakah distribusi ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika distribusi dan keadilan?
6. Peran etika dalam pengambilan keputusan: Aksiologi juga membahas peran etika dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang terkait dengan ketimpangan. Bagaimana etika memandu pengambilan keputusan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi?

Melalui perspektif aksiologi, indikator ketimpangan sosial dan ekonomi adalah alat

penilaian yang membantu kita mengevaluasi nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan ketimpangan dalam masyarakat. Ini membantu kita memahami peran etika dalam pengukuran, analisis, dan pengurangan ketimpangan serta bagaimana nilai-nilai moral memengaruhi tindakan dan kebijakan yang diadopsi untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

## **H. Indikator Kesejahteraan Sosial**

Bonus demografi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk akses terhadap perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Dalam perspektif ontologi, indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai representasi dari realitas sosial yang ada, yang mencerminkan kondisi, aspek, dan dimensi berbagai aspek kesejahteraan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang indikator kesejahteraan sosial dari sudut pandang ontologi:

1. Realitas kesejahteraan sosial: Indikator kesejahteraan mencerminkan realitas

kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan banyak lagi. Realitas ini merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat.

2. Eksistensi kesejahteraan sebagai konsep dan fenomena sosial: Dalam ontologi, kesejahteraan dianggap sebagai konsep dan fenomena sosial yang ada dalam realitas. Ini mencakup baik keadaan subjektif (bagaimana individu merasa tentang kesejahteraan mereka) maupun indikator objektif yang dapat diukur (seperti tingkat pengangguran, harapan hidup, atau pendapatan per kapita).
3. Konstruksi pengetahuan tentang kesejahteraan: Indikator kesejahteraan adalah produk dari pengetahuan dan pemahaman manusia tentang kesejahteraan. Mereka mencerminkan cara kita mengukur, menganalisis, dan memahami aspek-

aspek kesejahteraan dalam masyarakat. Ini mencakup proses konstruksi pengetahuan dan pengukuran.

4. Peran indikator dalam mewakili kesejahteraan: Indikator kesejahteraan adalah alat yang membantu kita mewakili dan mengukur berbagai aspek kesejahteraan. Mereka adalah representasi matematis dari realitas sosial yang kompleks ini dan dapat membantu dalam perbandingan, pemantauan, dan evaluasi kondisi sosial.
5. Keterkaitan antara aspek kesejahteraan: Indikator kesejahteraan mencerminkan keterkaitan antara berbagai aspek kesejahteraan dalam masyarakat. Misalnya, pendapatan yang rendah dapat berdampak pada akses ke layanan kesehatan atau pendidikan. Indikator membantu dalam memahami bagaimana aspek-aspek ini saling berhubungan dalam realitas sosial.

Melalui perspektif ontologi, indikator kesejahteraan sosial adalah alat yang membantu

kita merepresentasikan, mengukur, dan memahami realitas sosial kesejahteraan dalam masyarakat. Mereka mencerminkan eksistensi kesejahteraan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan membantu kita menjelajahi hubungan dan pengaruh berbagai aspek kesejahteraan dalam realitas sosial yang lebih besar.

Dalam perspektif epistemologi, indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai alat pengetahuan yang membantu kita memahami, mengukur, dan menganalisis kesejahteraan dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang indikator kesejahteraan sosial dari sudut pandang epistemologi:

1. Sumber pengetahuan tentang kesejahteraan:  
Indikator kesejahteraan adalah salah satu sumber pengetahuan yang membantu kita memahami kondisi kesejahteraan dalam masyarakat. Mereka didasarkan pada data empiris, penelitian, dan analisis yang memungkinkan kita memahami kesejahteraan sosial.

2. Metode pengukuran: Dalam epistemologi, perlu diperhatikan metode pengukuran yang digunakan dalam pembentukan indikator kesejahteraan. Bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan menjadi indikator yang relevan adalah subjek penelitian epistemologi.
3. Konstruksi pengetahuan tentang kesejahteraan: Indikator kesejahteraan adalah hasil dari konstruksi pengetahuan tentang kesejahteraan dalam masyarakat. Mereka mencerminkan cara kita mendefinisikan, mengukur, dan menganalisis kesejahteraan sebagai fenomena sosial.
4. Peran teori dan konsep: Teori-teori tentang kesejahteraan dan konsep-konsep yang digunakan dalam indikator kesejahteraan adalah bagian penting dari epistemologi. Bagaimana teori dan konsep-konsep ini digunakan dalam pembentukan indikator dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan menjadi fokus epistemologi.

5. Interpretasi data: Indikator kesejahteraan juga melibatkan interpretasi data. Bagaimana data dianalisis dan diinterpretasikan untuk menyimpulkan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat adalah subjek penelitian epistemologi.
6. Penggunaan pengetahuan dalam pengambilan keputusan: Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari indikator kesejahteraan digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana data ini memengaruhi kebijakan sosial, perencanaan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, dan individu adalah pertanyaan epistemologis.

Melalui perspektif epistemologi, indikator kesejahteraan sosial adalah alat pengetahuan yang membantu kita mengukur dan memahami kesejahteraan dalam masyarakat. Mereka mencerminkan konstruksi pengetahuan dan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis realitas sosial ini. Selain itu, indikator kesejahteraan juga merupakan sumber pengetahuan yang dapat

memengaruhi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam masyarakat.

## **I. Konsumsi Domestik**

Pertumbuhan konsumsi domestik merupakan indikator lain yang dapat menggambarkan dampak bonus demografi pada ekonomi, terutama dalam konteks pasar konsumen yang berkembang. Dalam konteks ontologi, konsumsi domestik mengacu pada pemahaman tentang bagaimana fenomena konsumsi oleh individu, keluarga, atau rumah tangga dalam masyarakat dianggap sebagai aspek eksistensial dalam realitas sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsumsi domestik dari sudut pandang ontologi:

1. **Realitas konsumsi:** Konsumsi domestik mencerminkan realitas konsumsi yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup pembelian dan penggunaan berbagai barang dan jasa oleh individu dan keluarga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



2. Eksistensi konsumsi: Dalam ontologi, konsumsi dianggap sebagai eksistensi sosial yang penting. Ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari individu dan keluarga dalam masyarakat, dan eksistensinya tercermin dalam tindakan nyata pembelian, penggunaan, dan pemenuhan kebutuhan.
3. Pengambilan keputusan konsumsi: Ontologi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana individu dan keluarga membuat keputusan konsumsi. Ini mencakup pertimbangan nilai, preferensi, dan pengaruh lingkungan yang memengaruhi keputusan tentang apa yang akan dibeli dan dikonsumsi.
4. Hubungan dengan aspek sosial lainnya: Konsumsi domestik juga mencerminkan hubungan dengan aspek sosial lain dalam realitas sosial. Misalnya, konsumsi memengaruhi aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.

5. Perubahan dalam realitas konsumsi:  
Konsumsi domestik juga dapat mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan dalam selera, teknologi, nilai-nilai budaya, dan situasi ekonomi dapat memengaruhi bagaimana individu dan keluarga mengkonsumsi barang dan jasa.
6. Konstruksi pengetahuan tentang konsumsi:  
Bagaimana kita memahami konsumsi domestik melibatkan konstruksi pengetahuan tentang konsumsi. Ini mencakup teori-teori ekonomi, sosiologi, psikologi, dan antropologi yang membentuk pemahaman tentang mengapa dan bagaimana kita mengkonsumsi.

Melalui perspektif ontologi, konsumsi domestik adalah bagian integral dari realitas sosial yang kompleks. Ini mencerminkan eksistensi, pemahaman, dan pengaruh konsumsi dalam kehidupan individu dan keluarga dalam masyarakat. Ini juga menggambarkan peran konsumsi dalam

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek sosial lainnya dalam realitas yang terus berkembang.

Dalam perspektif epistemologi, konsumsi domestik adalah subjek studi yang berfokus pada pemahaman, pengukuran, dan analisis tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang pola konsumsi barang dan jasa oleh individu, keluarga, atau rumah tangga dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsumsi domestik dari sudut pandang epistemologi:

1. Sumber pengetahuan tentang konsumsi: Epistemologi mencerminkan sumber-sumber pengetahuan yang digunakan untuk memahami konsumsi domestik. Ini mencakup data statistik, survei, penelitian, dan observasi yang membantu kita mengukur dan menganalisis pola konsumsi.
2. Metodologi penelitian: Epistemologi membahas metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumsi domestik. Ini termasuk metode survei, analisis

statistik, eksperimen, dan penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsumsi.

3. Konstruksi pengetahuan tentang konsumsi: Bagaimana pengetahuan tentang konsumsi dibentuk dan didefinisikan adalah subjek epistemologi. Ini mencakup bagaimana konsep-konsep, teori-teori, dan kerangka kerja digunakan dalam pemahaman tentang konsumsi.
4. Peran teori dan konsep: Epistemologi juga mencakup peran teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsumsi domestik. Ini mencakup teori ekonomi, sosiologi, psikologi konsumen, dan lainnya yang digunakan untuk menggambarkan mengapa orang mengkonsumsi dan bagaimana perilaku konsumsi terbentuk.
5. Interpretasi data: Bagaimana data konsumsi domestik diinterpretasikan dan dianalisis dalam konteks sosial dan ekonomi adalah subjek penelitian epistemologi. Hal ini mencakup

pertanyaan tentang bagaimana kita memahami tren konsumsi, pengaruh faktor sosial dan ekonomi, serta dampaknya pada masyarakat.

6. Penggunaan pengetahuan tentang konsumsi: Epistemologi juga membahas bagaimana pengetahuan tentang konsumsi digunakan dalam konteks kebijakan, perencanaan ekonomi, dan pengambilan keputusan. Bagaimana data konsumsi digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran, perencanaan sosial, dan kebijakan ekonomi adalah bagian penting dari epistemologi.

Melalui perspektif epistemologi, konsumsi domestik adalah subjek studi yang melibatkan metode penelitian, konstruksi pengetahuan, dan penggunaan data untuk memahami pola konsumsi dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana pengetahuan tentang konsumsi dibentuk, diperoleh, dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

## **J. Investasi dalam Penelitian dan Inovasi**

Bonus demografi dapat menjadi dorongan bagi investasi dalam penelitian dan inovasi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Investasi dalam penelitian dan inovasi adalah subjek yang dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, investasi dalam penelitian dan inovasi dapat dilihat sebagai realitas sosial dan ekonomi yang nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana keputusan investasi memengaruhi perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Investasi dalam penelitian dan inovasi mencerminkan eksistensi entitas ekonomi, seperti perusahaan, pemerintah, dan lembaga penelitian, yang berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan dan inovasi. Ini juga mencakup peran individu, kelompok, dan lembaga dalam mempengaruhi investasi dan dampaknya pada perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang investasi dalam

penelitian dan inovasi diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan, metodologi penelitian, dan cara kita memahami dampak investasi tersebut. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana kita memahami inovasi sebagai konsep dan fenomena sosial. Ini termasuk penerapan metode penelitian, analisis data, dan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dampak investasi pada perkembangan pengetahuan dan inovasi. Dari perspektif aksiologi, investasi dalam penelitian dan inovasi terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai yang mendasari keputusan investasi, seperti nilai-nilai ekonomi, sosial, dan etis. Investasi dalam penelitian dan inovasi juga mencerminkan pertimbangan etika terkait dengan dampak investasi pada masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan dalam distribusi pengetahuan dan teknologi, dan dampak jangka panjang dari inovasi.

Secara keseluruhan, investasi dalam penelitian dan inovasi adalah fenomena sosial dan ekonomi yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat. Ontologi memandangnya sebagai realitas yang ada, epistemologi fokus pada cara kita memahami investasi dan inovasi, sedangkan aksiologi mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai dan etika dalam keputusan investasi tersebut. Dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi, pemahaman yang holistik melalui tiga perspektif ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Indikator-indikator ini membantu pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memahami dampak bonus demografi pada perekonomian suatu negara dan merencanakan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaatnya.



## **BAB V**

### **GREEN ECONOMY MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045**

Menghadapi target Indonesia Emas 2045, yang menandakan visi untuk menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pada tahun 2045, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mempertimbangkan konsep *Green Economy* atau Ekonomi Hijau. Ekonomi Hijau mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pemeliharaan lingkungan alam dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan konsep Ekonomi Hijau:

#### **A. Pengembangan Energi Terbarukan**

Investasi dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomassa. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan energi terbarukan adalah isu yang dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang

filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, pengembangan energi terbarukan dapat dilihat sebagai bagian dari realitas fisik dan alam semesta. Ini mencakup pemahaman tentang sumber daya alam, seperti matahari, angin, air, dan biomassa, yang digunakan untuk menghasilkan energi. Pengembangan energi terbarukan mencerminkan eksistensi teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya ini menjadi energi yang berguna. Selain itu, ontologi mencakup konsep tentang ketergantungan manusia pada sumber daya alam dan dampak ekologis dari kebijakan energi (Soetomo & Hidayat, 2019).

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang pengembangan energi terbarukan diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam pengembangan energi terbarukan, seperti penelitian ilmiah, analisis teknis, dan pengalaman praktis. Epistemologi juga mencakup pertanyaan

tentang cara kita memahami efektivitas teknologi energi terbarukan, dampak lingkungan, dan tantangan yang terkait dengan implementasinya. Ini melibatkan metode penelitian, analisis data, dan teori yang digunakan untuk menggambarkan dampak teknologi energi terbarukan.

Dari perspektif aksiologi, pengembangan energi terbarukan terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam pengembangan energi terbarukan. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan akses universal terhadap energi dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, distribusi adil sumber daya energi, dan dampak sosial dari proyek energi terbarukan.

Dengan melihat pengembangan energi terbarukan melalui tiga sudut pandang filsafat ini, kita dapat memahami bagaimana teknologi energi terbarukan memengaruhi realitas fisik, bagaimana

pengetahuan tentang energi terbarukan diperoleh dan dianalisis, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan energi terbarukan. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran energi terbarukan dalam mencapai tujuan berkelanjutan dan bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana.

## **B. Efisiensi Energi**

Memperbaiki efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Efisiensi energi adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, pengembangan efisiensi energi dapat dipandang sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana energi digunakan, disimpan, dan didistribusikan dalam masyarakat dan alam semesta. Efisiensi energi mencerminkan

eksistensi teknologi, perangkat, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak ekologis, ekonomi, dan sosial dari kebijakan dan teknologi efisiensi energy (Setiawan & Pratiwi, 2020).

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang efisiensi energi diperoleh, dipahami, dan digunakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, pengukuran efisiensi, dan teknologi efisiensi energi yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan penggunaan energi. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang efisiensi energi berkontribusi pada perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Dari perspektif aksiologi, efisiensi energi terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam pengembangan efisiensi energi. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keterjangkauan energi,

keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), distribusi adil sumber daya energi, dan dampak sosial dari kebijakan efisiensi energi.

Melihat efisiensi energi melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana teknologi efisiensi energi memengaruhi realitas fisik dan ekonomi, bagaimana pengetahuan tentang efisiensi energi diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan efisiensi energi. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran efisiensi energi dalam mencapai tujuan berkelanjutan dan bagaimana kita dapat mengelola sumber daya energi dengan bijaksana.

### **C. Pertanian Berkelanjutan**

Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk

kimia, serta mempromosikan pertanian organik. Pertanian berkelanjutan adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, pertanian berkelanjutan dapat dipandang sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pertanian dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, pemulihan tanah, dan pelestarian sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan mencerminkan eksistensi praktik-praktik pertanian yang menghormati alam, ekologi, dan keberlanjutan. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak sosial dan ekonomi dari pertanian berkelanjutan, serta bagaimana realitas ini memengaruhi masyarakat dan alam (Widjaya & Riani, 2018).

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode

penelitian, ilmu pertanian berkelanjutan, dan teknologi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan berkontribusi pada perkembangan teknologi pertanian yang lebih berkelanjutan dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi tindakan petani dan pembuat kebijakan.

Dari perspektif aksiologi, pertanian berkelanjutan terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam pertanian berkelanjutan. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan hak petani dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan hak-hak petani, dan distribusi adil sumber daya pertanian.

Melihat pertanian berkelanjutan melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami



bagaimana praktik pertanian berkelanjutan memengaruhi realitas fisik dan ekologi, bagaimana pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan pertanian berkelanjutan. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran pertanian berkelanjutan dalam mencapai tujuan berkelanjutan dan bagaimana kita dapat mengelola sistem pertanian dengan bijaksana.

#### **D. Manajemen Limbah**

Mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Manajemen limbah adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, manajemen limbah dapat dipandang sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana limbah dihasilkan sebagai

produk sampingan kegiatan manusia dan bagaimana limbah ini memengaruhi lingkungan fisik. Manajemen limbah mencerminkan eksistensi infrastruktur, teknologi, dan proses yang digunakan untuk mengelola limbah. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak ekologis dan sosial dari manajemen limbah, serta bagaimana realitas ini memengaruhi masyarakat dan alam.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang manajemen limbah diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu lingkungan, dan teknologi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan praktik manajemen limbah yang efektif. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang manajemen limbah berkontribusi pada perkembangan teknologi pengelolaan limbah yang lebih baik dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi tindakan perusahaan dan pembuat kebijakan.

Dari perspektif aksiologi, manajemen limbah terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam manajemen limbah. Nilai-nilai seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, pengurangan limbah, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam manajemen limbah dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan perlindungan hak-hak pekerja dan komunitas yang terpengaruh oleh praktik manajemen limbah. Melihat manajemen limbah melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana praktik manajemen limbah memengaruhi realitas fisik dan ekologi, bagaimana pengetahuan tentang manajemen limbah diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan manajemen limbah. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran manajemen limbah dalam

mencapai tujuan berkelanjutan dan bagaimana kita dapat mengelola limbah dengan bijaksana.

### **E. Konservasi Sumber Daya Alam**

Melindungi dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, termasuk hutan, air, dan biodiversitas, untuk jangka panjang. Konservasi sumber daya alam adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, konservasi sumber daya alam dapat dilihat sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang sumber daya alam, termasuk hutan, sungai, lautan, tanah, dan hewan, dan bagaimana sumber daya ini merupakan komponen penting dari alam semesta. Konservasi sumber daya alam mencerminkan eksistensi tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan, memulihkan, dan melindungi sumber daya alam ini. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak ekologis dan sosial dari eksploitasi sumber daya alam.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu lingkungan, dan teknologi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan praktik konservasi. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam berkontribusi pada perkembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi tindakan pemerintah, organisasi, dan individu.

Dari perspektif aksiologi, konservasi sumber daya alam terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam konservasi. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan perlindungan hak-hak komunitas lokal dan kelompok

yang terpengaruh oleh praktik konservasi sumber daya alam.

Melihat konservasi sumber daya alam melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana praktik konservasi sumber daya alam memengaruhi realitas fisik dan ekologi, bagaimana pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan konservasi sumber daya alam. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran konservasi sumber daya alam dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan bagaimana kita dapat menjaga dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana.

## **F. Transportasi Hijau**

Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan mobil listrik. Transportasi hijau adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat,

termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, transportasi hijau dapat dilihat sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem transportasi beroperasi, termasuk kendaraan, infrastruktur, dan jaringan transportasi. Transportasi hijau mencerminkan eksistensi teknologi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari transportasi konvensional dan transportasi hijau.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu lingkungan, dan teknologi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan praktik transportasi hijau. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau berkontribusi pada perkembangan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan,

serta bagaimana pengetahuan ini memengaruhi tindakan pemerintah, perusahaan, dan individu.

Dari perspektif aksiologi, transportasi hijau terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam transportasi. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan hak individu untuk mobilitas dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam transportasi hijau, distribusi yang adil dari manfaatnya, dan hak pekerja yang terlibat dalam industri transportasi.

Melihat transportasi hijau melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana praktik transportasi hijau memengaruhi realitas fisik dan ekologi, bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan transportasi hijau. Pendekatan holistik ini membantu kita



mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran transportasi hijau dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan transportasi dengan bijaksana.

### **G. Pengurangan Plastik**

Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengembangkan alternatif yang ramah lingkungan. Transportasi hijau adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, transportasi hijau dapat dilihat sebagai realitas fisik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem transportasi beroperasi, termasuk kendaraan, infrastruktur, dan jaringan transportasi. Transportasi hijau mencerminkan eksistensi teknologi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang dampak ekologis,

sosial, dan ekonomi dari transportasi konvensional dan transportasi hijau.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu lingkungan, dan teknologi yang digunakan untuk memahami dan menerapkan praktik transportasi hijau. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau berkontribusi pada perkembangan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan, serta bagaimana pengetahuan ini memengaruhi tindakan pemerintah, perusahaan, dan individu. Dari perspektif aksiologi, transportasi hijau terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam transportasi. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan hak individu untuk mobilitas dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan

tanggung jawab sosial perusahaan dalam transportasi hijau, distribusi yang adil dari manfaatnya, dan hak pekerja yang terlibat dalam industri transportasi.

Melihat transportasi hijau melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana praktik transportasi hijau memengaruhi realitas fisik dan ekologi, bagaimana pengetahuan tentang transportasi hijau diperoleh dan digunakan, dan bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait dengan transportasi hijau. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran transportasi hijau dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan transportasi dengan bijaksana.

## **H. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan**

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan melalui pendidikan dan kampanye sosial. Pendidikan dan kesadaran

lingkungan adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, pendidikan dan kesadaran lingkungan dapat dipandang sebagai realitas abstrak yang berinteraksi dengan realitas fisik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pendidikan dan kesadaran lingkungan adalah konsep dan proses mental yang ada dalam pikiran manusia. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang keterkaitan antara pendidikan lingkungan, pemahaman ekologi, dan perilaku individu dan masyarakat dalam konteks lingkungan alam dan sosial.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang pendidikan dan kesadaran lingkungan diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode pendidikan, ilmu psikologi, dan proses kognitif yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman lingkungan dan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan

tentang pendidikan dan kesadaran lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan, perubahan perilaku, dan pembentukan sikap terhadap lingkungan.

Dari perspektif aksiologi, pendidikan dan kesadaran lingkungan terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai sosial, ekologis, dan moral yang mendasari kebijakan dan tindakan dalam pendidikan lingkungan. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial, keadilan lingkungan, dan hak-hak individu dalam konteks lingkungan dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan bagaimana pendidikan dan kesadaran lingkungan memengaruhi tindakan individu dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Melihat pendidikan dan kesadaran lingkungan melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana konsep dan proses pendidikan lingkungan memengaruhi realitas mental dan perilaku manusia, bagaimana pengetahuan

tentang lingkungan diperoleh dan digunakan, serta bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan pendidikan, sikap, dan tindakan terkait dengan lingkungan. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan bagaimana kita dapat membentuk pemahaman dan perilaku yang lebih ramah lingkungan.

## **I. Kebijakan Hijau**

Membangun kerangka kebijakan yang mendukung praktik bisnis dan investasi hijau, seperti insentif pajak dan peraturan lingkungan yang ketat. Kebijakan hijau adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Dalam ontologi, kebijakan hijau dapat dilihat sebagai realitas sosial dan politik yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang

bagaimana kebijakan hijau mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang struktur kebijakan, hukum lingkungan, dan regulasi yang digunakan untuk mengatur perlindungan lingkungan. Ini mencakup pemahaman tentang peran pemerintah, lembaga internasional, dan aktivis lingkungan dalam menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan hijau.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang kebijakan hijau diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu lingkungan, dan analisis kebijakan yang digunakan untuk memahami dan membela kebijakan hijau. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang kebijakan hijau memengaruhi perubahan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks lingkungan.

Dari perspektif aksiologi, kebijakan hijau terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup

pertimbangan tentang nilai-nilai ekologis, sosial, dan moral yang mendasari kebijakan hijau. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan kebebasan individu dalam konteks lingkungan dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, partisipasi masyarakat, dan distribusi yang adil dari manfaat kebijakan hijau.

Melihat kebijakan hijau melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan lingkungan mencerminkan realitas sosial dan politik, bagaimana pengetahuan tentang kebijakan hijau diperoleh dan digunakan, serta bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan, tindakan, dan implementasi praktik yang berkelanjutan. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kebijakan hijau dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan bagaimana kita dapat membentuk kebijakan yang lebih baik untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam.



## **J. Kolaborasi Internasional**

Bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mempromosikan praktik Ekonomi Hijau dan pertukaran teknologi dan pengetahuan. Kolaborasi internasional untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah isu yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang filsafat, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, kolaborasi internasional untuk ekonomi hijau dapat dipandang sebagai realitas sosial dan ekonomi yang eksis dalam dunia nyata. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana negara-negara dan organisasi internasional bekerja sama dalam upaya menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ontologi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana ekonomi hijau mencerminkan perubahan dalam infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan alam. Ini mencakup pemahaman tentang kerangka kerja hukum dan perjanjian internasional yang mengatur kerja sama ekonomi hijau.

Dalam epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan tentang kolaborasi internasional dalam konteks ekonomi hijau diperoleh, dipahami, dan digunakan. Ini mencakup pemahaman tentang metode penelitian, ilmu ekonomi hijau, dan analisis kebijakan yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi dan praktik terbaik dalam mencapai ekonomi hijau. Epistemologi juga mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang kerja sama internasional dalam ekonomi hijau berkontribusi pada perubahan perilaku negara dan organisasi dalam hal keberlanjutan ekonomi. Dari perspektif aksiologi, kolaborasi internasional dalam ekonomi hijau terkait dengan nilai-nilai dan etika. Ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang mendasari upaya kolaborasi internasional. Nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan ekonomi, keadilan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi hijau dapat menjadi perhatian aksiologi. Pertimbangan etika juga melibatkan distribusi yang adil dari

manfaat kerja sama internasional dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terpengaruh oleh perubahan ekonomi.

Melihat kolaborasi internasional untuk ekonomi hijau melalui tiga sudut pandang filsafat ini membantu kita memahami bagaimana kerja sama internasional mencerminkan realitas ekonomi dan sosial, bagaimana pengetahuan tentang praktik ekonomi hijau diperoleh dan digunakan, serta bagaimana nilai-nilai dan etika memengaruhi kebijakan, tindakan, dan implementasi praktik yang berkelanjutan. Pendekatan holistik ini membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kerja sama internasional dalam mencapai tujuan ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dan bagaimana kita dapat membentuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ekonomi Hijau bukan hanya akan membantu mencapai target ekonomi, tetapi juga akan melindungi lingkungan alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.

## **BAB VI**

### **EKONOMI DIGITAL DAN BONUS DEMOGRAFI**

Ekonomi digital dan bonus demografi adalah dua aspek penting yang dapat saling memengaruhi dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah hubungan antara ekonomi digital dan bonus demografi:

#### **A. Peningkatan Produktivitas**

Bonus demografi, yang menciptakan lebih banyak tenaga kerja muda dan berpendidikan, dapat digunakan untuk memajukan sektor ekonomi digital. Tenaga kerja muda yang terampil dapat berkontribusi pada perkembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang merupakan fondasi ekonomi digital. Peningkatan produktivitas dapat dianalisis melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Peningkatan produktivitas dalam ontologi dilihat sebagai fenomena nyata yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan organisasi.

Ini mencakup peningkatan dalam output, efisiensi, atau kinerja dalam berbagai konteks, termasuk ekonomi, produksi, dan pekerjaan. Peningkatan produktivitas dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan dan evolusi alam semesta, di mana manusia menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai lebih banyak dalam waktu dan sumber daya yang sama (Bloom et al., 2016).

Pengetahuan tentang peningkatan produktivitas diperoleh melalui penelitian, analisis data, pengukuran, dan pengalaman praktis. Ini dapat melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk memahami dampak tindakan tertentu terhadap produktivitas. Epistemologi juga membahas berbagai teori dan model yang digunakan untuk mengukur dan memahami produktivitas dalam berbagai konteks, seperti produktivitas ekonomi, produktivitas kerja, atau produktivitas organisasi. Nilai-nilai dalam peningkatan produktivitas dapat mencakup inovasi, keberlanjutan, efisiensi, kualitas, dan kesetaraan. Aksiologi mempertimbangkan

apakah peningkatan produktivitas yang dicapai dihargai dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika. Etika dalam peningkatan produktivitas berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak mengorbankan hak-hak pekerja, lingkungan, atau kesejahteraan sosial.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang arti dan nilai dari peningkatan produktivitas. Ini membantu kita merumuskan strategi yang lebih baik untuk mencapai peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika yang kita anut.

## **B. Peningkatan Akses Internet**

Dengan bonus demografi yang besar, ada tekanan lebih besar untuk meningkatkan akses internet di negara tersebut. Generasi muda cenderung mengandalkan teknologi digital untuk informasi, belanja, pendidikan, dan hiburan. Oleh

karena itu, infrastruktur digital yang kuat menjadi penting untuk mendukung ekonomi digital. Peningkatan akses internet dapat dianalisis melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Akses internet dalam ontologi dianggap sebagai entitas nyata yang memungkinkan manusia terhubung ke jaringan global informasi. Ini adalah infrastruktur teknologi yang mendukung interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi di seluruh dunia. Peningkatan akses internet dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan perluasan jangkauan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan komunikasi global.

Pengetahuan tentang akses internet diperoleh melalui pengalaman langsung dan eksperimen, pengamatan praktis, dan studi ilmiah. Orang memahami bagaimana internet berfungsi melalui penggunaan, pembelajaran, dan eksplorasi teknologi. Epistemologi juga mencakup pengetahuan tentang manfaat dan risiko akses

internet, yang diperoleh melalui penelitian, analisis data, dan pengalaman individu atau kolektif.

Nilai-nilai dalam akses internet dapat mencakup kebebasan berbicara, akses terhadap informasi, partisipasi sosial, inovasi, dan konektivitas global. Aksiologi mempertimbangkan apakah akses internet yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai ini. Etika dalam akses internet berkaitan dengan masalah seperti privasi, keamanan, perlindungan data pribadi, akses yang adil, serta penggunaan yang bertanggung jawab dalam lingkungan digital.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami akses internet dalam kerangka konsep, pengetahuan, dan nilai-nilai yang melingkupinya. Hal ini membantu kita merancang dan mengelola akses internet dengan memperhitungkan makna, pengetahuan, dan etika yang relevan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat secara global.



### **C. Kewirausahaan Digital**

Bonus demografi dapat mendorong pertumbuhan kewirausahaan digital di negara tersebut. Generasi muda yang terampil dapat menciptakan startup dan bisnis *online* yang inovatif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian dan analisis mengenai kewirausahaan digital (digital entrepreneurship) dapat dijelaskan melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kewirausahaan digital dalam ontologi dianggap sebagai fenomena nyata yang melibatkan individu atau organisasi dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis menggunakan teknologi digital. Ini melibatkan eksistensi entitas seperti platform e-commerce, startup teknologi, aplikasi mobile, dan inovasi digital lainnya. Peningkatan eksistensi kewirausahaan digital dapat diinterpretasikan sebagai perkembangan dalam cara bisnis dijalankan dan beradaptasi dengan era digital, serta sebagai bagian dari evolusi ekonomi global (Posso, 2019).

Pengetahuan tentang kewirausahaan digital diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan penelitian. Ini melibatkan pemahaman tentang model bisnis digital, strategi pemasaran *online*, pengelolaan data, analisis data, serta perkembangan teknologi terbaru. Epistemologi juga mencakup aspek pengukuran keberhasilan dalam kewirausahaan digital, termasuk metrik seperti *Return on Investment (ROI)*, konversi, pertumbuhan pengguna, dan analisis perilaku pelanggan.

Nilai-nilai dalam kewirausahaan digital dapat mencakup inovasi, kreativitas, adaptabilitas, efisiensi, dan responsibilitas. Aksiologi mempertimbangkan apakah praktik kewirausahaan digital memenuhi standar etika bisnis dan apakah mereka memberikan manfaat yang berkelanjutan. Etika dalam kewirausahaan digital berkaitan dengan isu-isu seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, privasi pengguna, dan dampak lingkungan dari teknologi digital.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami dan mengevaluasi

kewirausahaan digital dalam konteks makna, pengetahuan, dan etika. Ini membantu dalam merancang dan mengelola bisnis digital dengan pertimbangan yang lebih luas tentang dampak dan tanggung jawabnya dalam era digital.

#### **D. Keterampilan Digital**

Bonus demografi memungkinkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital yang diperlukan untuk ekonomi digital. Generasi muda dapat belajar dan menguasai keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan *electronic commerce* (*e-commerce*). Pengertian dan analisis mengenai keterampilan digital (*digital skills*) dapat dijelaskan melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Keterampilan digital dalam ontologi dianggap sebagai atribut atau kapasitas individu yang memungkinkan mereka untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi dalam lingkungan digital. Ini mencakup pengetahuan tentang perangkat lunak, platform, komunikasi digital,

analitika data, dan kemampuan untuk menavigasi internet dengan efektif. Peningkatan keterampilan digital dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan untuk berfungsi di dunia yang semakin terhubung secara digital.

Pengetahuan tentang keterampilan digital diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman praktis, dan eksplorasi teknologi. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep seperti penggunaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, analisis data, dan banyak lagi. Epistemologi juga mencakup aspek evaluasi keterampilan digital, termasuk bagaimana kita mengukur dan memverifikasi kemampuan individu dalam konteks teknologi digital.

Nilai-nilai dalam keterampilan digital mencakup pemberdayaan individu, inklusi digital, akses informasi, dan kesetaraan peluang. Aksiologi mempertimbangkan apakah pengembangan keterampilan digital mematuhi prinsip-prinsip ini. Etika dalam keterampilan digital berkaitan dengan

isu-isu seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, hak privasi, dan tanggung jawab pengguna dalam dunia digital.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami, mengevaluasi, dan mempromosikan keterampilan digital dalam kerangka konsep, pengetahuan, dan etika yang relevan. Ini membantu dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan individu dalam era digital serta memastikan bahwa keterampilan digital digunakan dengan tanggung jawab dan dampak positif.

## **E. Konsumsi Digital**

Bonus demografi dapat meningkatkan konsumsi barang dan layanan digital seperti perangkat elektronik, aplikasi, layanan streaming, dan *e-commerce*. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini dalam ekonomi. Konsumsi digital adalah fenomena kompleks yang dapat dianalisis melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Konsumsi digital dalam ontologi dianggap sebagai aktivitas nyata di mana individu menggunakan teknologi digital, seperti komputer, ponsel cerdas, dan internet, untuk mengakses, memproses, dan berinteraksi dengan konten digital. Ini mencakup konsumsi konten media sosial, video, musik, berita, perangkat lunak, dan berbagai layanan *online* lainnya. Peningkatan eksistensi konsumsi digital mencerminkan pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dengan informasi, hiburan, dan barang-barang secara keseluruhan dalam era digital.

Pengetahuan tentang konsumsi digital diperoleh melalui pengalaman individu, pendidikan, penelitian, dan analisis data. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen memproses informasi, berinteraksi dengan konten digital, dan membuat keputusan pembelian dalam lingkungan digital. Epistemologi juga mencakup bagaimana kita memahami perubahan perilaku konsumen, tren, dan dampak konsumsi digital terhadap masyarakat, budaya, dan ekonomi.

Nilai-nilai dalam konsumsi digital dapat mencakup akses informasi, kebebasan berbicara, kreativitas, kenyamanan, dan privasi. Aksiologi mempertimbangkan apakah praktik konsumsi digital mematuhi nilai-nilai ini dan apakah pengguna internet menjalankan etika dalam interaksi digital. Etika dalam konsumsi digital berkaitan dengan masalah seperti perlindungan privasi, keamanan siber, kejujuran dalam media sosial, dan dampak sosial dari konsumsi digital yang berlebihan atau berbahaya.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami, mengevaluasi, dan memandu konsumsi digital dalam kerangka konsep, pengetahuan, dan etika yang relevan. Ini membantu dalam mempromosikan konsumsi digital yang lebih bijaksana dan etis, serta memastikan bahwa teknologi digital digunakan dengan manfaat dan dampak positif dalam masyarakat dan kehidupan individu.

## **F. Pengembangan Ekosistem *Start-Up***

Bonus demografi dapat membantu dalam pengembangan ekosistem startup yang kuat dengan menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan, serta potensi investor muda yang tertarik pada ekonomi digital. Pengembangan ekosistem start-up adalah suatu bidang yang dapat dianalisis melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ekosistem start-up dalam ontologi dianggap sebagai rangkaian interaksi antara berbagai elemen seperti perusahaan start-up, investor, inkubator, universitas, pemerintah, dan sebagainya yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan *start-up*. Peningkatan eksistensi ekosistem *start-up* mencerminkan perkembangan dalam cara bisnis dan inovasi dipercepat, serta sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan teknologi yang lebih luas (World Bank, 2019).

Pengetahuan tentang pengembangan ekosistem *start-up* diperoleh melalui penelitian, pengalaman praktis, analisis data, dan kerjasama



antara berbagai pemangku kepentingan. Ini melibatkan pemahaman tentang praktik terbaik, tren industri, dan strategi pengembangan ekosistem. Epistemologi juga mencakup bagaimana kita memahami peran inovasi, teknologi, dan kewirausahaan dalam ekosistem *start-up* serta bagaimana kita memahami pengukuran keberhasilan dalam konteks ini.

Nilai-nilai dalam pengembangan ekosistem *start-up* mencakup inovasi, kreativitas, kewirausahaan, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi. Aksiologi mempertimbangkan apakah ekosistem *start-up* memungkinkan nilai-nilai ini dan apakah ia mematuhi etika bisnis dan sosial. Etika dalam pengembangan ekosistem *start-up* berkaitan dengan isu-isu seperti keberlanjutan, kesetaraan akses, perlindungan hak intelektual, dan kebijakan publik yang mendukung inovasi dan *start-up*.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami, mengevaluasi, dan merancang ekosistem *start-up* dalam kerangka konsep, pengetahuan, dan etika yang relevan. Ini

membantu dalam mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan ekosistem *start-up* yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan masyarakat, serta memastikan bahwa nilai-nilai dan etika yang baik diterapkan dalam pengembangan *start-up*.

### **G. Pemerintah Digital**

Generasi muda yang aktif secara digital dapat mendorong pemerintah untuk mengadopsi layanan publik digital yang lebih efisien dan transparan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah digital adalah konsep yang dapat dianalisis melalui tiga perspektif filsafat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Pemerintah digital dalam ontologi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan interaksi antara pemerintah dan warganya. Ini mencakup penggunaan teknologi seperti sistem informasi, big data, layanan *online*, *electronic government/e-government/e-pemerintahan*, dan

sebagainya. Peningkatan eksistensi pemerintah digital mencerminkan pergeseran dalam bagaimana pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warganya dalam era digital.

Pengetahuan tentang pemerintah digital diperoleh melalui pengalaman praktis dalam administrasi pemerintah, penelitian, analisis data, dan pendidikan. Ini melibatkan pemahaman tentang kebijakan teknologi, strategi transformasi digital, dan dampak teknologi dalam pemerintahan. Epistemologi juga mencakup bagaimana kita memahami peran partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks pemerintah digital serta bagaimana kita mengukur keberhasilan pemerintah digital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai dalam pemerintah digital mencakup transparansi, partisipasi publik, efisiensi, kualitas pelayanan, hak privasi, dan perlindungan data. Aksiologi mempertimbangkan apakah pemerintah digital mematuhi nilai-nilai ini dan apakah mereka menjalankan etika dalam penggunaan data dan

teknologi. Etika dalam pemerintah digital berkaitan dengan isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, hak asasi manusia dalam lingkungan digital, dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan teknologi.

Melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami, mengevaluasi, dan memandu perkembangan pemerintah digital dalam kerangka konsep, pengetahuan, dan etika yang relevan. Ini membantu dalam mempromosikan pemerintah yang lebih efektif, responsif, dan etis dalam era digital, serta memastikan bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan dan hak warga negara dengan baik.

Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan ekonomi digital tidak hanya bergantung pada bonus demografi. Faktor-faktor seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi yang kuat, akses ke modal, dan lingkungan bisnis yang kondusif juga sangat penting. Dengan memanfaatkan bonus demografi dengan bijaksana, negara dapat menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dalam era ekonomi digital pada masyarakat 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2017). Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation. *American Economic Review*, 107(5), 174-179.
- Adioetomo, S. M., & Samosir, O. B. (2010). Dasar-Dasar
- Adioetomo, Sri Moertiningsih. (2005). Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Anju Nofarof Hasudungan, & Yusuf Kurniawan. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform [www.indonesia2045.org](http://www.indonesia2045.org). Seminar Nasional Multidisiplin 2018.
- BKKBN. (2012). Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja. Jakarta.
- BKKBN. 2017. Bonus Demografi. (Online). Tersedia di <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus-demografi-meningkatkan-kualitaspendinguduk-melalui-keluarga>.
- Bloom, D. E., & Canning, D. (2003). Contraception and the Celtic Tiger. *Economic and Social Review*, 34(3), 229-247.

- Bloom, N., Draca, M., & Van Reenen, J. (2016). Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity. *The Review of Economic Studies*, 83(1), 87-117.
- Demografi (Kedua). Salemba Empat.
- Dwiyana, D. (2015). Penyuluhan BKKBN mengenai generasi berencana dan sikap remaja. *Jurnal Simbolika USU*, 1(2), 199–210.
- Ginting, J. (2016). Menyiasati Bonus Demografi Indonesia Tahun 2020-2030. *Kompasiana*.
- Indahsari, L. I., & Setyowati, R. N. (2015). Implementasi Ekstrakurikuler Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di SMK PGRI Sooko Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(3), 651-666.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/policy\\_paper/ringkasan%20eksekutif%20visi%20indonesia%202045\\_fina1.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/policy_paper/ringkasan%20eksekutif%20visi%20indonesia%202045_fina1.pdf).
- Lee, R. (2003). The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change. *Journal of Economic Perspectives*, 17(4), 167-190.
- Lembaga Demografi FEUI. (1981). *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Maunah, B. (2014). The implementation of character education in the formation of students' holistic

- personality. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 90-101.
- Mediastuti, F., & Setyorini, R. H. (2014). Analisis Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling The Analysis of Community Based Center for Information and Adolescent Counseling Management in Yogyakarta. *MKMI*, 80–84.
- Nasution M. 2021. Hubungan bonus demografi, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunanketenagakerjaan dengan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Budget* 6(1): 74-95.
- Nuraini L, Irma NA, Zukrofus Z, Arif C, Diah ARS. 2023. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Indonesia Berdaya*, 4(1): 243-252.
- Panggabean*, Mutiara, S. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Gahalia: Jakarta.
- Posso, A. (2019). The Impact of Digital Technologies on Skills, Employment and Earnings: Evidence from a panel of countries. *International Labour Review*, 158(1), 45-70.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2015. Buku Ajar Kesehatan Ibu Dan Anak. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Setiawan, A., & Pratiwi, A. (2020). Green Growth in the 2045 Vision of Indonesia: Challenges and Opportunities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), 2531.



- Shaddiq, S., Haryono, S., Muafi, M., & Isfianadewi, D. (2021). Antecedents and Consequences of Cyberloafing in Service Provider Industries: Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 157-167.
- Soetomo, A. H., & Hidayat, R. (2019). Toward Indonesia's 2045 Golden Anniversary: The Role of Green Economy. *Journal of Sustainable Development*, 12(2), 11-24.
- Tiffani WF, Mayasari, Maulana R. 2020. Implementasi program keluarga berencana (kb) dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di kelurahan sumur batu kecamatan bantar gebang kota bekasi. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7 (3): 525-540.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2016). Demographic dividend. [www.unfpa.org](http://www.unfpa.org) (dalam bahasa Inggris).
- Widjaya, G., & Riani, E. (2018). Green Economy and Sustainable Development in Indonesia: A Vision for 2045. *Sustainability*, 10(4), 1070.
- World Bank. (2019). Indonesia's Big Bet on the Digital Economy: A Look at the Opportunities and Challenges. World Bank Group.